

SKRIPSI

**PEMANFAATAN POTENSI BLUE ECONOMY DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT PESISIR
SECARA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN TANAKEKE**



Oleh:

MUH. SYAMSUL

Nomor Induk Mahasiswa: 105641101720

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PEMANFAATAN POTENSI BLUE ECONOMY DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT PESISIR
SECARA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN TANAKEKE**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. SYAMSUL

Nomor Induk Mahasiswa: 105641101720

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Di Kepulauan Tanakeke

Nama Mahasiswa : Muh. Syamsul

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101720

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si


Nursaleh Hartaman, S. IP., M.IP

Mengetahui:

Dekan
Fisip Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 992797


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 120 7163

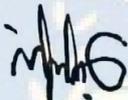
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0290/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

()

2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

()

3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

()

4. Hardianto Hawing, ST., MA

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Syamsul

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101720

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muh. Syamsul

ABSTRAK

Muh Syamsul, Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke (dibimbing oleh Andi Luhur Prianto dan Nursaleh Hartaman)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemanfaatan potensi *Blue Economy* terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di kepulauan tanakeke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini terkait pemanfaatan *blue economy* dan kendala yang terjadi serta solusi dalam proses implementasi *blue economy* pada sektor kelautan di Kepulauan Tanakeke. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi *blue economy* di Kepulauan Tanakeke belum berjalan dengan optimal, meskipun wilayah ini memiliki produk unggulan seperti ikan bandeng, udang, rumput laut, dan hutan mangrove. Beberapa faktor utama yang menghambat perkembangan *blue economy* di wilayah ini antara lain adalah kondisi alam yang tidak selalu mendukung serta keterbatasan anggaran biaya yang tersedia untuk pengembangan dan pemeliharaan program-program terkait.

Kata Kunci: *Blue economy*, Pembangunan Berkelanjutan, Kepulauan Tanakeke

MOTTO

Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan maka tidak akan pernah di menangkan.

Jika hidup hanya sekedar hidup makan babi di hutan juga hidup

Jika hidup hanya sekedar bekerja, maka kera di hutan juga bekerja.

Buatlah kehidupan ini lebih bermakna, karn hidup tanpa adanya perjuangan dan pencapaian adalah hidup yang menghianati esensi dan makna tujuan kehidupan.

QS Al-Mu'minum ayat 115

A fa ḥasibtum annama khalaqnakum 'abatsaw wa annakum ilaina la turja'un (Maka apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu dengan main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami)

QS Al-Anbiya ayat 16

Wa ma khalaqnas-sama`a wal-arda wa ma bainahuma la'ibin (Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.)

Ketika darah masih tetap mengalir dan nafas belum terputus, maka pergunakan kesempatan itu dengan menjalani kehidupan dengan penuh makna.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembaran yang paling indah dalam laporan skripsi ini selain lembaran persembahan skripsi ini. Sebagai Penulis skripsi ini, saya persembahkan untuk Dua Malaikat yang di titipkan Tuhan untuk penulis yang menyerupai bentuk Manusia. Dia menjadi bagian yang paling vital dalam perjalanan hidup penulis, manusia yang paling di hormati oleh penulis, manusia yang menjadi sutradara sekaligus produser dalam film kehidupan penulis, yaitu TETTA dan AMMA'. Dia bernama Nyengka Daeng Nyau dan Nurbaya Daeng Jipa manusia yang penulis maksud di awal paragraf halaman persembahan ini. Merupakan suatu nikmat yang tidak bisa terhitung dengan jari dan rasa syukur yang begitu dalam atas pencapaian ini. walaupun sedikit mengalami kesulitan, kelelahan dan hambatan hingga adanya terlintas rasa ingin putus asa. Namun berkat kerja keras, niat yang tulus, mimpi yang harus dicapai dan adanya bimbingan dari sosok laki dan perempuan mulia yang saya sayangi (AYAH dan IBU) akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga penulis persembahkan skripsi ini oleh ke-tiga adik laki-laki nya , SYAHRUL, SYAMSIR dan SAYYID. 4 (empat) bersaudara dalam keluarga yang sederhana, di didik dengan kesederhanaan dan di besarkan dengan kesederhanaan. Di besarkan oleh kedua orang tua yang tidak pernah merasakan pendidikan bahkan tidak mengenali huruf abjad, tetapi kedua orang tua kami selalu mengusahan anaknya untuk bisa berpendidikan dan menimbah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia serta kehidupan selanjutnya. *gassing ki nai tetta, gassing ki nai amma, gassing ki nai andi'– andi' ku. Barang na rellai ja allah ta'ala ambalasa'ki golla na kaluku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis hanturkan kehadiran AllahSWT karena limpahan Rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa bernafas hingga skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke.” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai patron pergerakan ummat islam. Merupakan suatu nikmat yang tidak bisa terhitung dengan jari dan rasa syukur yang begitu dalam atas pencapaian ini, dalam penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walaupun sedikit mengalami kesulitan, kelelahan dan hambatan hingga adanya terlintas rasa ingin putus asa. Namun berkat kerja keras, niat yang tulus, dan mimpi yang harus dicapai. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan beberapa pihak yang membimbing dan membina penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tetta Nyengka Daeng Nyau saya ucapkan Terimah Kasih yang tak terhitung karna berkat perjuangan, keringat dan kerja keras beliau sehingga penulis berkesempatan menuntut dalamnya sumur ilmu pengetahuan dan menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
2. Kepada Amma'ku Nurbaya Daeng Jipa, perempuan yang pernah mempertaruhkan nyawanya melahirkan penulis, sehinggah penulis dapat melihat kehidupan ini. Entah ucapan Terimah Kasih apa yang setara dengan

perjuangannya selama ini dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga bisa sampai ke tahap ini. Tetapi ucapan terima kasih yang penulis niatkan kepadanya adalah semoga penulis dapat membahagiakannya di hari tua nya.

3. Ayahanda Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si. Selaku pembimbing I dan Kakanda Nursaleh Hartaman S.IP., M.IP., Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dengan penuh rasa ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana penulis.
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin seluruh jajaran fakultas dengan sebaik-baiknya.
5. Ayahanda Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa selama penulis berada di ruang akademik.
6. Ibunda Nur Khaerah, S.IP.,M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain sebagai dosen dan sekjur, beliau juga sebagai panutan saya dalam berorganisasi di kampus.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi wawasan dan ilmunya selama proses perkuliahan.

8. Kepada Syahrul, Syamsir dan Sayyid selaku Saudara penulis yang menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dan belajar sungguh-sungguh untuk bisa menjadi kakak tertua mereka yang baik dalam membina adik-adiknya.
9. Kepada seluruh keluarga besar Dato' Alle dan Nenek Bunga. Kalian telah berkontribusi dalam proses penulis menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
10. Kepada Organisasi penulis yang telah dianggap sebagai rumah, HIMJIP dan PIKOM IMM FISIP sebagai wadah berproses dan mempelajari banyak hal yang InsyaAllah bermanfaat nantinya di sesi kehidupan yang akan datang.
11. Terununtut teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis yang telah menjadi saudara tak sedarah di perantauan ini, kalian telah menjadi palokon dalam sesi kehidupan penulis di perantauan.

Penulis menyadari bahwa skripsi “Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Di Kepulauan Tanakeke.” ini penulis buat masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan mendatang.

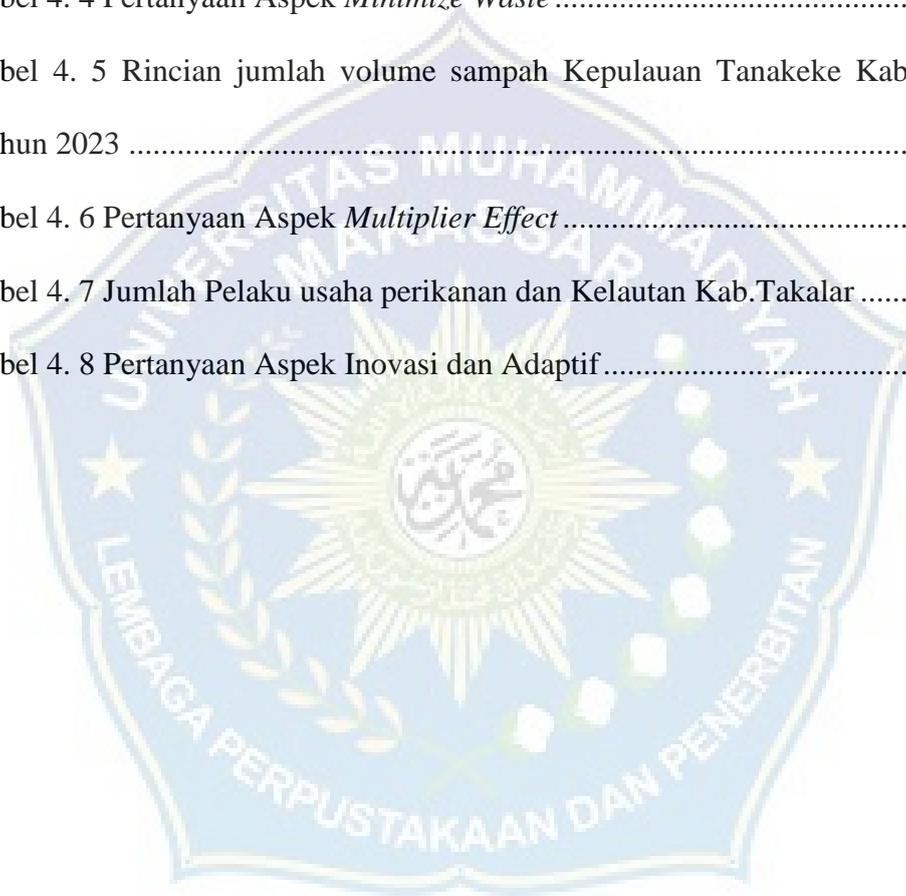
DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	11
1. Konsep Blue Economy	11
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	16
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Fokus Penelitian	30
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III	35
METEDOLOGI PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Informan	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37

E. Teknik Analisis Data	38
F. Teknik Pengabsahan Data	39
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Objek Penulisan	40
1. Keadaan Geografis Kepulauan Tanakeke	40
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	45
1. Inklusi Sosial	47
2. Waste (Peminimalisiran Limbah).....	59
3. Multiplier Effect	73
4. Inovasi dan Adaptif	85
C. Peluang dan Tantangan Penerapan Blue economy di Kepulauan Tanakeke	97
1. Peluang	97
2. Tantangan	100
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Informan.....	37
Tabel 4. 1 Luas Daerah menurut Desa di Kecamatan Kepulauan Tanakeke	42
Tabel 4. 2 Komponen Ekonomi Biru	46
Tabel 4. 3 Pertanyaan Aspek Inklusi Sosial.....	53
Tabel 4. 4 Pertanyaan Aspek <i>Minimize Waste</i>	60
Tabel 4. 5 Rincian jumlah volume sampah Kepulauan Tanakeke Kab. Takalar Tahun 2023	65
Tabel 4. 6 Pertanyaan Aspek <i>Multiplier Effect</i>	75
Tabel 4. 7 Jumlah Pelaku usaha perikanan dan Kelautan Kab.Takalar	82
Tabel 4. 8 Pertanyaan Aspek Inovasi dan Adaptif.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kepulauan Tanakeke	40
Gambar 4. 2 Persentase luas daerah Desa di Kecamatan Kepulauan Tanakeke ..	42
Gambar 4. 3 Presentase penduduk menurut Desa di Kec, Kepulauan Tanakeke ..	43
Gambar 4. 4 Penduduk kab. Takalar menurut pekerjaan dan jenis kelamin.....	45
Gambar 4. 5 Penduduk kab. Takalar menurut pekerjaan dan jenis kelamin.....	49
Gambar 4. 6 Sarana Kesehatan Kepulauan Tanakeke	50
Gambar 4. 7 Pengolahan limbah sayuran dan buah menjadi pupuk kompos	68
Gambar 4. 8 Sampah masyarakat yang di buang ke Laut	70
Gambar 4. 9 Sampah Masyarakat yang dibuang ke pekarangan	70
Gambar 4. 10 Gambar Keindahan Alam Kepulauan Tanakeke	78
Gambar 4. 11 Keindahan Alam Kepulauan Tanakeke.....	78
Gambar 4. 12 Produksi Budidaya Rumput Laut di kab. Takalar	81
Gambar 4. 13 Budidaya Air Payau Kabupaten Takalar	90
Gambar 4. 14 Budidaya Air Laut Kabupaten Takalar.....	91
Gambar 4. 15 Budidaya Rumput Laut.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* memiliki potensi besar untuk mengubah perekonomian masyarakat pesisir kepulauan, di era globalisasi konsep ekonomi biru merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peisisir sekaligus perlindungan kondisi lingkungan lautan yang tetap biru. Secara harfiah masyarakat pesisir adalah kelompok manusia yang tinggal dan mendiami daerah pesisir, memiliki budaya sendiri, dan membentuk identitas yang unik terkait dengan penggunaan sumber daya dan lingkungan pesisir. Umumnya, masyarakat pesisir cenderung menetap di wilayah dekat garis pantai untuk mendukung kelangsungan hidup mereka (Mawar et al., 2023)

Ada dua kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat pesisir ketika mereka tinggal di daerah pantai. Pertama, mereka memiliki akses yang mudah untuk menangkap ikan, mengumpulkan dan membudidayakan rumput laut, serta melakukan kegiatan maritim lainnya yang mendukung perekonomian mereka. Kedua, mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas mandi, mencuci, dan memiliki kemudahan dalam pembuangan limbah domestik ke wilayah pantai atau laut. (Putra & Asri, 2023). Meskipun demikian, kenyataannya, kemudahan- kemudahan tersebut tidak menghapuskan masyarakat pesisir dari dampak kemiskinan dan marginalisasi. Perangkat kemiskinan yang memengaruhi kehidupan nelayan

disebabkan oleh faktor-faktor kompleks seperti perubahan iklim, fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan akses; jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif; serta dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong overfishing dan kerusakan lingkungan laut. Kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan pendapatan ini kemudian menjadi masalah serius. (Intyas et al., 2022)

Wilayah pesisir kepulauan memegang peran penting dalam keragaman hayati laut dan memberikan kontribusi vital terhadap ekonomi lokal termasuk Kepulauan Tanakeke sebagai suatu wilayah pesisir. Namun, kompleksitas tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Tanakeke menuntut solusi terpadu. Kepulauan Tanakeke dihadapkan pada ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pengelolaan sumber daya laut dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi *Blue Economy* dianggap sebagai strategi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sofyaningrum et al., 2023).

Salah satu program pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan kelautan adalah pemanfaatan potensi kebijakan *blue economy*. Ekonomi biru dianggap sebagai solusi terbaik dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan kemiskinan yang umumnya dialami oleh masyarakat pesisir. Prinsip-prinsip Ekonomi Biru dirancang untuk menciptakan pertumbuhan positif dalam sektor ekonomi kelautan dan

perikanan. Ekonomi biru umumnya berbasis pada pengembangan ekonomi rakyat secara menyeluruh, dengan tujuan meningkatkan pembangunan nasional secara besar-besaran. Selain itu, Ekonomi Biru menekankan prinsip *zerowaste*, di mana setiap sumber daya yang diambil dari alam harus dimanfaatkan manusia secara optimal. Sebagai contoh, jika seorang nelayan menangkap ikan tuna di laut, maka semua bagian ikan, termasuk kepala, ekor, daging, tulang, bahkan darah, harus diolah sebagai produk industri hilir berkualitas tinggi (Harsono, 2020) Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan memberdayakan sektor kelautan dalam jangka panjang, serta menciptakan lapangan kerja baru guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Strategi *blue economy* melibatkan langkah-langkah seperti mengurangi jumlah sampah laut, menerapkan penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, dan meningkatkan produksi olahan hasil laut menjadi berbagai produk yang beragam. (Haris et al., 2023)

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah pesisir kepulauan semakin meningkat. Kepulauan Tanakeke, sebagai contoh mikrokosmos, menghadapi permasalahan serius terkait kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, pengelolaan berkelanjutan dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Mayoritas masyarakat kepulauan Tanakeke berprofesi sebagai nelayan dan memanfaatkan sumber daya laut di kepulauan Tanakeke. Akan tetapi para nelayan tidak memikirkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Sebagai

contoh masyarakat di desa tompotanah kec. Kepulauan Tanakeke mengelola batang pohon mangrove menjadi arang dengan cara menebang pohon mangrove lalu dibakar sampai menjadi arang. Hal ini mengancam kerusakan ekosistem laut karna sebagai besar habitat sumber daya laut hidup di kawasan hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya jumlah tangkapan ikan oleh para nelayan yang mengandalkan pendapat di sektor perikanan dan juga dapat mengacu kerusakan lingkungan seperti terjadinya abrasi di kepulauan Tanakeke.

Kekayaan Sumber daya laut dikepulauan Tana keke sangat beragam, akan tetapi hasil sumber daya tersebut kurang dikelola dengan baik. Seperti rumput laut yg hanya di jual mentah yang seharusnya masyarakat bisa memproduksi menjadi produk lalu diekspor sehingga pendapatan para nelayan menjadi lebih besar. Oleh karna itu di perlukan pemanfaatan potensi *blue economy* agar hasil laut di kepulauan Tanakeke bisa menjaga ekosistem laut dan meningkatkan perekonomian masyarakat kepulauan Tanakeke. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan potensi *Blue Economy* sebagai solusi holistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di kepulauan tanakeke.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke.”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang yang telah di uraikan di atas ditentukan masalah pokok dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pemanfaatan potensi *Blue Economy* dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemanfaatan potensi *Blue Economy* terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di kepulauan tanakeke.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari segi teori dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Pembahasan ini diharapkan penelitian dapat menjadi panduan bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan di wilayah pesisir kepulauan tanakeke.

2. Manfaat Praktis

Hasil Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana dampak pemanfaatan potensi *Blue Economy* terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di kepulauan Tanakeke.



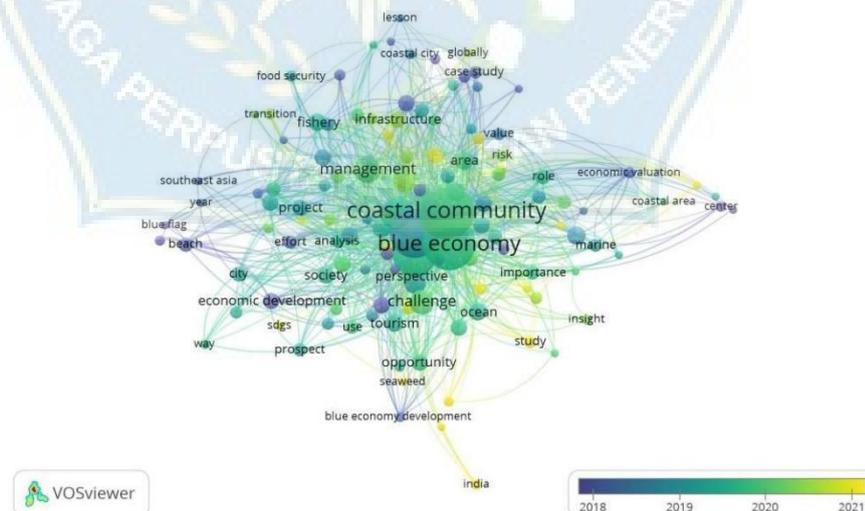
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan diuraikan secara sistematis mengenai penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian (Halim, 2016), penelitian terdahulu sangat penting bagi penulis untuk menjadi landasan pembanding dan sebagai referensi untuk memperkaya teori yang akan digunakan dalam menyajikan kontribusi penyempurnaan dari penelitian terdahulu dengan konsep yang berbeda dalam sebuah penelitian baru. Adapun beberapa kajian terdahulu yang masih relevan dengan judul “Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke.” dengan penelitian terdahulusebagai berikut:

Gambar 2.1: Penelitian Terdahulu Menggunakan Aplikasi Vosviewer



Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan lebih dari 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci implementasi; *blue economy*; masyarakat pesisir. Artikel-artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *Vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian peneliti. Artikel-artikel tersebut telah dianalisis dan dimasukkan ke dalam aplikasi *Vosviewer* guna mengidentifikasi fokus, lokasi, dan objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, artikel-artikel tersebut membentuk landasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi *Economy Blue*.

Hasil dari visualisasi *vosviewer* mengelompokkan 4 klaster. Klaster 1 dengan warna biru mencakup 6 item yakni ekonomi blue, tantangan, pertumbuhan ekonomi, analisis, masyarakat penentu. Klaster 2 berwarna hijau yang terbagi atas 7 item yaitu komunitas pesisir proyek, peran, wawasan, evaluasi ekonomi, nilai, pengelolaan kawasan Klaster 3 berwarna kuning dengan 3 item yakni india, pembangunan ekonomi biru, pemerintahan. Klaster 4 berwarna ungu yang terbagi atas 5 item yakni India, kota pesisir sebagai global, studi kasus, infrastruktur, perikanan transisi.

Beberapa persamaan dan perbedaan dapat diidentifikasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai Pemanfaatan Potensi *blue economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di kepulauan Tanakeke.

Adapun Persamaan nya adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada Blue Economy

Pada Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang Sama-sama memiliki fokus pada konsep blue economy sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan kepulauan Tanakeke.

2. Orientasi

Pembangunan dan Kesejahteraan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang memiliki tujuan yang sejalan, yaitu orientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Analisis dengan Aplikasi *Vosviewer*

Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang Keduanya menggunakan aplikasi *Vosviewer* untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan penelitian serta mengidentifikasi tren dan fokus penelitian sebelumnya.

Adapun Perbedaan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian terdahulu cenderung bersifat lebih umum dan tidak terpaku pada lokasi atau objek tertentu salah satu contohnya dalam penelitian (Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Tentang Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan Blue Economy masa pemerintahan Joko Widodo. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji mengenai kebijakan *blue economy* dimana dalam masa pemerintahan Joko Widodo

perencanaan pembangunan di Indonesia membawa dampak positif bagi kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan. Perencanaan pembangunan dengan menerapkan model ekonomi biru memiliki konsekuensi pada perubahan paradigma perilaku masyarakat untuk lebih cinta lingkungan, lebih memperhatikan sumber daya hayati, dan berusaha untuk menjaga kelestariannya, dan penelitian sekarang akan dilakukan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar Kec. Kepulauan Tanakeke.

2. Metodologi dan Pendekatan

Penelitian terdahulu dalam judul Model blue economy dikawasan asia pasifik (studi kasus: penerapan model blue economy pada industri perikanan Indonesia) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan, penerapan model blue economy secara berdampingan dalam perencanaan pembangunan Indonesia membawa dampak positif bagi kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan. Dan penelitian sekarang akan dilakukan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar Kec. Kepulauan Tanakeke dan melihat bagaimana pemanfaatan potensi blue economy ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan kepulauan Tanakeke.

B. Kajian Teori

1. Konsep Blue Economy

Konsep pembangunan dengan *blue economy*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul "*The Blue Economy: 10 years, 100 innovations and 100 million jobs*," didasarkan pada prinsip "*The blue ocean and blue sky*." Konsep ini, seperti yang diuraikan Gunter Pauli pada tahun 2010, merinci bahwa *blue economy* mencakup kombinasi dari "*blue ocean*" dan "*blue sky*," yang menggambarkan pendekatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap memelihara kondisi laut dan langit yang biru.

1. Blue Ocean

Blue ocean mengacu pada ide menciptakan ruang dan peluang baru dalam perekonomian, seperti membuka "samudra biru" yang belum terjamah atau dieksplorasi sebelumnya. Ini mencakup inovasi dan kreasi baru untuk memperluas sektor ekonomi.

2. Blue Sky

Blue sky menekankan pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Konsep ini menciptakan hubungan harmonis antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam, sehingga meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, lingkungan tetap terjaga. (Bidayani, 2016) Meskipun konsep *Blue Economy* masih relatif baru dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, potensi penerapannya sangat signifikan mengingat Indonesia

merupakan salah satu negara maritim dengan lautan yang luas dan sumber daya alam kelautan yang melimpah. Oleh karena itu, konsep Blue Economy dapat diintegrasikan secara efektif dalam upaya pembangunan dan perkembangan ekonomi, khususnya dalam sector perikanan dan kelautan di Indonesia

Prinsip dari konsep *blue economy* sendiri adalah menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi "samudra biru" ekonomi baru dan memastikan keberlanjutan lingkungan ("langit biru"), *blue economy* bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang, termasuk peningkatan jumlah lapangan kerja. Dengan demikian, konsep ini mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga kelestarian laut dan lingkungan secara keseluruhan. Ekonomi biru bukan hanya diharapkan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui perekonomian rendah karbon.

Model ekonomi kelautan dengan pendekatan biru didasarkan pada empat indikator utama. Pertama, integrasi pembangunan daratan dan kelautan menjadi fokus. Kedua, pembangunan yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan menjadi prioritas. Ketiga, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk melalui inovasi. Terakhir, meningkatkan pendekatan masyarakat yang adil, merata, dan pantas. (Rani & Cahayasari, 2015)

Pendekatan ekonomi biru dapat dipahami sebagai kebijakan yang fokus pada pengembangan ekonomi rakyat secara menyeluruh dengan tujuan mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsep pembangunan ini sejalan dengan program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan). *Blue economy*, yang pertama kali diangkat oleh Gunter Pauli, telah menjadi sorotan dalam berbagai forum kerjasama internasional, termasuk APEC di Moskow pada tahun 2012 dan berbagai pertemuan lainnya di berbagai belahan dunia. Berikut beberapa indikator dalam ketercapaian prinsip *blue economy*:

1. Inklusi sosial

Inklusi sosial adalah konsep yang mencakup upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu merasa diakui, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ini melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, etnis, atau kondisi lainnya. Inklusi sosial bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat keragaman, dan mempromosikan keterlibatan aktif semua individu dalam pembangunan yang berkelanjutan. (Izzati & Affa, 2023)

2. Minimize Waste

Minimize waste adalah upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan atau dikirimkan ke tempat pembuangan sampah, dengan mengadopsi praktik-praktik seperti pengurangan konsumsi, penggunaan kembali bahan atau produk, dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Tujuan dari minimasi limbah adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta mendorong praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Ini mencakup penekanan pada pencegahan limbah di sumbernya, peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan pembangunan masyarakat yang lebih sadar akan lingkungan. (Sinaga et al., 2013)

3. Multipillar Effect

Multipillar effect dapat merujuk pada situasi di mana beberapa faktor atau komponen yang berbeda bekerja bersama-sama untuk menciptakan dampak yang signifikan atau kompleksitas yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh setiap faktor secara individu. Ini bisa merujuk pada berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, atau sosial. "multipillar effect" tidak merupakan istilah yang umum digunakan, maka definisi dan maknanya, dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penggunaannya dalam suatu diskusi atau konteks tertentu.

4. Inovasi dan Adaptif

Inovasi dan adaptif mengacu pada kapabilitas untuk menghasilkan solusi baru (inovasi) dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan (adaptasi). Kedua aspek ini penting dalam kemajuan dan keberhasilan di berbagai bidang, termasuk bisnis, teknologi, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Inovasi melibatkan penciptaan hal baru atau pengembangan solusi baru untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Ini bisa termasuk penemuan teknologi baru, pengembangan produk baru, peningkatan dalam proses produksi, atau pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.

Inovasi mendorong perubahan positif dan pertumbuhan, dan menjadi kunci utama bagi kemajuan di berbagai bidang. Sementara itu, kemampuan adaptif berkaitan dengan respons terhadap perubahan dalam lingkungan atau kondisi tertentu. Orang yang adaptif mampu mengatasi tantangan, menyesuaikan strategi atau pendekatan mereka ketika diperlukan, dan tetap relevan dalam situasi yang berubah-ubah. (Respatiningsih et al., 2020).

Beberapa prinsip ekonomi biru yang ditekankan adalah efisiensi alam, yang berarti bahwa ekonomi biru mengambil contoh dari alam (ekosistem) dengan bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam secara efisien, tanpa merugikan alam, tetapi malah memperkaya alam (berpindah dari kelangkaan ke kelimpahan). Nir limbah, yang mengacu pada konsep nol limbah, di mana limbah dari satu proses menjadi sumber energi atau

makanan bagi proses lainnya. Dengan demikian, ekosistem bekerja dalam keseimbangan, energi didistribusikan efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, dan menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrisi dan energi tanpa meninggalkan limbah, sehingga memanfaatkan kemampuan semua kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua elemen dalam ekosistem. (Satria, 2015).

Blue economy diarahkan untuk menjadi model pembangunan kelautan nasional yang mampu merespons hubungan yang seimbang antara ekonomi dan ekosistem, serta untuk mengatasi dampak negatif dari aktivitas ekonomi, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Pendekatan ekonomi biru diharapkan dapat menghasilkan industrialisasi sektor kelautan yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan modernisasi sistem produksi dari hulu hingga hilir.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan

Wilayah pesisir merupakan sebuah kawasan dinamis yang sangat strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Tetapi sayangnya program pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir belumlah tergarap secara proposional. Pemanfaatan sumber daya kelautan belum di “managed” secara tepat guna, yang semakin diperparah timbulnya konflik-konflik kepentingan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir. Jika ditinjau dari konteks

pengembangan masyarakat (community development), masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir yang hidupnya masih tertinggal.

Perangkap kemiskinan di wilayah pesisir disebabkan oleh serangkaian faktor yang sangat kompleks. Ini meliputi keterikatan pada pola pekerjaan tertentu, di mana nelayan sering kali terbatas untuk mencari pekerjaan lain karena pekerjaan mereka yang terkait erat dengan aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, fluktuasi musim ikan juga menjadi faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan secara signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan akses juga menjadi hambatan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir. Selain itu, jaringan perdagangan ikan yang cenderung mengeksploitasi nelayan sebagai produsen juga berkontribusi pada rendahnya daya tawar nelayan. Tidak hanya itu, tingkat pendapatan yang terus menurun dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga juga menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan keterpaduan dan koordinasi antara para pelaksana pembangunan dengan masyarakat pesisir itu sendiri. Secara khusus, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, meliputi keterbatasan dalam pengetahuan, ketrampilan, modal, penguasaan teknologi dan manajemen, serta peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang ada. Dalam mengembangkan masyarakat pesisir, penting untuk memperhatikan dan mengatasi semua permasalahan tersebut secara holistik dan terpadu (Indarti & Kuntari, 2015).

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ada 4 indikator yang dapat menunjang ketercapaian konsep tersebut. Berikut 4 indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan;

1. Integrasi pembangunan daratan dan kelautan.

Kekayaan alam yang melimpah di wilayah laut memberikan signifikansi besar bagi pembangunan nasional. Posisi strategis Indonesia tidak hanya terlihat dari letaknya dipersimpangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), tetapi juga karena posisinya di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur di sebelah utara, serta Samudera Hindia diselatan. Hal ini menempatkan Indonesia dalam peran kunci dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan baik. Presiden Jokowi telah menetapkan lima pilar pembangunan Indonesia sebagai Poros Kelautan Dunia dalam pertemuan di forumG-20.

Jokowi menyatakan komitmen Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi lautnya dalam bidang ekonomi kelautan. Dalam upaya mengimplementasikan visi Poros Kelautan Dunia, percepatan pembangunan sektor kelautan menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan kebijakan kelautan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 (Sari, 2019).

Visi kelautan Indonesia adalah mencapai status sebagai Poros Kelautan Dunia, yang berarti menjadi negara kelautan yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, dan memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan kelautan Indonesia terdiri dari tujuh pilar, antara lain: pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari, dan diplomasi kelautan. Pembangunan di sektor kelautan harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yang berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap lingkungan hidup dan sumber daya kelautan. Pembangunan kelautan Indonesia merupakan bagian integral dari upaya menuju Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berdasarkan kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibuat konstruksi kebijakan yang mengarah pada pembangunan kelautan yang komprehensif, melalui pendekatan sosial-budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Pendekatan sosial-budaya sangat penting karena melibatkan pemahaman akan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang memandang laut sebagai sumber daya yang dapat memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tentang budaya maritim harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda, dengan materi pembelajaran yang mencakup potensi dan kekuatan kelautan Indonesia.

Selain itu, penting juga untuk mendukung pendirian perguruan tinggi berbasis maritim guna memperkuat kesadaran akan budaya maritim di kalangan generasi muda. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa restorasi budaya maritim akan terus berlangsung, dan generasi muda akan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya laut dalam pembangunan nasional. Sebagai negara maritim, masyarakat Indonesia percaya bahwa laut bukan hanya merupakan sumber kekayaan, tetapi juga sebagai sarana persatuan bangsa, media diplomasi, transportasi, serta aspek penting dalam pertahanan dan keamanan (Satria, 2015).

2. Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Indonesia saat ini menghadapi tantangan di bidang ekonomi. Tantangan tersebut yaitu upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang selama ini bergantung pada sumber daya alam yang melimpah dan upah tenaga kerja yang rendah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan. Pertumbuhan yang inklusif diartikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap peluang ekonomi tersebut. Pertumbuhan

inklusif memungkinkan semua individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan prinsip kesetaraan, terlepas dari perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi mereka. (Negara, 2013)

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Strategi ini tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga fokus pada pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan, tanah, dan air dengan bijaksana untuk mencegah kerusakan lingkungan, serta memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Selain itu, strategi ini juga bertujuan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah berhasil membangun stabilitas politik dan ekonomi sejak mengalami krisis keuangan dan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas masih menjadi tantangan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Strategi ini tidak hanya bertujuan mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga fokus pada pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan, tanah, dan air dengan bijaksana untuk mencegah kerusakan lingkungan, serta memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Selain itu, strategi ini juga bertujuan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah berhasil membangun stabilitas politik dan ekonomi sejak mengalami krisis keuangan dan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas masih menjadi tantangan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mencakup penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di masa depan. (Kustiwan & Ramadhan, 2019)

3. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Melalui Inovasi

Berbagai studi menunjukkan bahwa inovasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk, serta membuka peluang baru untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan mengurangi biaya produksi. Namun, implementasi inovasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kebijakan yang tidak mendukung, kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan daya saing ekonomi melalui inovasi, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat umum. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan dukungan untuk riset dan pengembangan. Institusi pendidikan perlu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan inovasi. (AlAidhiet al., 2023)

Upaya tersebut mencakup peningkatan sektor budidaya dan industri rumput laut serta penerapan standarisasi untuk menjaga kualitas produk. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran penting dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan konsep Blue Economy, kementerian ini bertanggung jawab atas pengembangan inovasi berorientasi pada pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya ini termasuk menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi, pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui pemanfaatan sektor tersebut. (Khaldun, 2017)

4. Peningkatan Pendekatan Masyarakat Yang Adil Merata.

Peningkatan pendekatan masyarakat yang adil dan merata di masyarakat pesisir Kepulauan Tanakeke merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir tersebut, mendapatkan manfaat yang seimbang dan merata dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar mereka.

Pendekatan yang adil berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir. Ini menghindari terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Pendekatan yang merata mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok saja, tetapi juga tersebar secara merata di seluruh komunitas pesisir. Ini berarti bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang kurang menguntungkan, memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (Hidayaturahmi & Herna, n.d.)

Peningkatan pendekatan masyarakat yang adil dan merata bisa melibatkan berbagai langkah, seperti: (Suuib, 2023)

- 1) Partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pembangunan di wilayah pesisir.
- 2) Pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk pengembangan industri lokal yang berkelanjutan seperti pariwisata berbasis masyarakat, perikanan berkelanjutan, atau kerajinan lokal.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang inklusif dengan membangun infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan sarana kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang.
- 4) Pendidikan dan kesehatan dengan memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat pesisir umumnya memiliki ciri khas yang pluralistik namun tetap mempertahankan semangat kebersamaan. Ini berarti bahwa struktur masyarakat pesisir mencakup karakteristik baik dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Karena strukturnya yang sangat pluralistik, masyarakat pesisir dapat membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan hasil akulturasi dari berbagai komponen yang membentuk struktur masyarakat mereka.

Yang menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, tinggal di dekat pantai dianggap sebagai keinginan utama karena memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dua contoh sederhana dari kemudahan-kemudahan tersebut adalah pertama, aksesibilitas yang lebih mudah ke sumber mata pencaharian, karena sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut sekitarnya, seperti penangkapan ikan, pengumpulan atau budidaya rumput laut, dan sebagainya. Kedua, kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan MCK (mandi, cuci, dan kakus), di mana mereka dapat dengan mudah membersihkan tubuh, mencuci peralatan rumah tangga, dan membuang limbah domestik langsung ke pantai atau laut. (Hajar et al., 2018). Masyarakat pesisir memiliki sifat atau karakteristik khusus yang terkait erat dengan kegiatan di bidang perikanan. Sifat ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim, dan pasar, sehingga karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Beberapa sifat dan karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada Kondisi Lingkungan

Salah satu karakteristik yang sangat mencolok dalam usaha perikanan adalah ketergantungan yang tinggi pada keberlanjutan kondisi lingkungan, khususnya kualitas air. Hal ini memiliki implikasi signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kesejahteraan

masyarakat pesisir sangat bergantung pada keadaan lingkungan dan menjadi sangat rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan, terutama akibat pencemaran oleh limbah industri atau tumpahan minyak, yang dapat mengguncang pondasi kehidupan sosial ekonomi mereka.

Contohnya, pencemaran yang terjadi di pantai Jawa dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan penurunan drastis dalam produksi udang tambak. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sangat rentan terhadap perubahan dalam kondisi lingkungan, dan pencemaran dapat memiliki dampak yang serius terhadap keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ketergantungan yang tinggi pada kualitas lingkungan ini menegaskan perlunya upaya lebih besar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan ekosistem pesisir. Pemerintah, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta, harus bekerja sama untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif guna mengatasi pencemaran dan memulihkan kondisi lingkungan. Hanya dengan pendekatan terpadu dan kolaboratif ini, keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terjamin. (Miraetal., 2014).

2. Ketergantungan pada Musim

Ciri khas lain yang sangat mencolok di kalangan masyarakat pesisir, terutama para nelayan, adalah ketergantungan mereka pada perubahan musim. Ketergantungan ini terasa lebih signifikan bagi nelayan kecil. Ketika memasuki musim penangkapan, para nelayan menjadi sangat sibuk

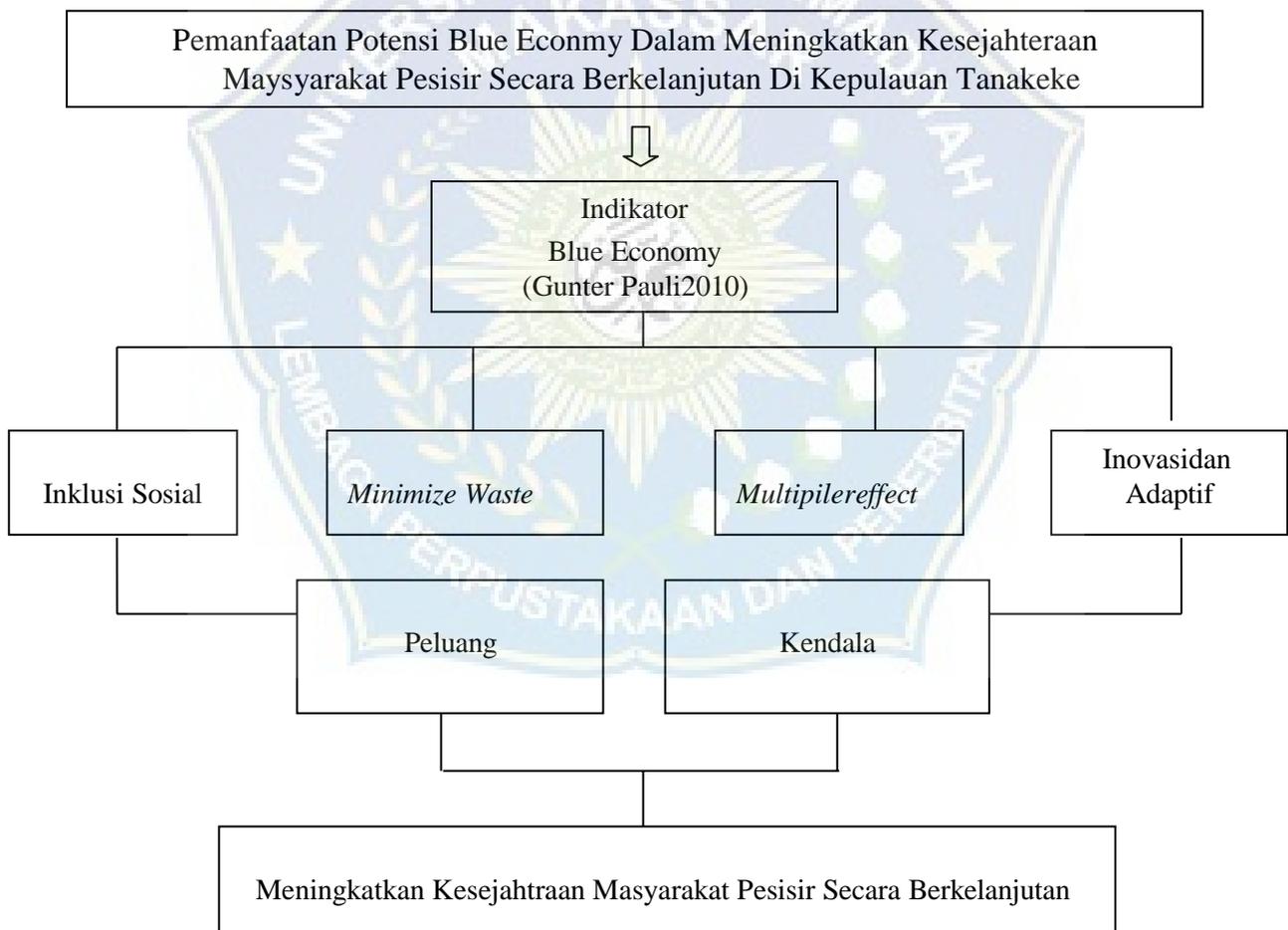
melaut. Sebaliknya, pada musim paceklik, kegiatan melaut mengalami penurunan, menyebabkan banyak nelayan mengalami pengangguran. Ketergantungan pada musim memiliki dampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan, khususnya bagi para nelayan. Pada musim tertentu, mereka mungkin mampu membeli barang-barang mahal seperti kursi- meja atau lemari. Namun, pada musim paceklik, pendapatan mereka turun drastis, mengakibatkan penurunan kualitas hidup mereka. (Mira et al., 2014)



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bermodel konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi menjadi masalah yang penting. Penelitian ini membahas Pemanfaatan Potensi Blue Economy Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Di Kepulauan Tanakeke. Berikut kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Di Kepulauan Tanakeke. Fokus penelitian dapat mencakup analisis dampak Pemanfaatan Potensi *blue economy* terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir kepulauan Tanakeke, melibatkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Identifikasi potensi sumber daya laut yang dapat dikembangkan, serta evaluasi keberlanjutan inisiatif *blue economy* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup penduduk pesisir.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Inklusi Sosial

Fokus inklusi sosial dalam konteks *blue economy* di masyarakat kepulauan Tanakeke adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama mereka yang rentan atau terpinggirkan, turut serta dalam manfaat dan pengelolaan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan.

2. Minimize Waste

Fokus *minimize waste* dalam konteks *blue economy* di masyarakat kepulauan Tanakeke bertujuan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya laut dan pesisir. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir, sambil meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan

memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan lingkungan.

3. Multiplier effect

Fokus pada *multiplier effect* dalam konteks *blue economy* di masyarakat kepulauan Tanakeke melibatkan pemahaman tentang bagaimana investasi dan aktivitas ekonomi dalam sektor *blue economy* dapat menghasilkan dampak positif yang berlipat ganda dalam perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, aktivitas ekonomi di sektor perikanan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih luas. Hal ini dapat tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat lokal yang memicu permintaan akan barang dan jasa lainnya, serta berkontribusi positif pada sektor ritel, jasa, dan konstruksi di kepulauan Tanakeke.

Selain itu, *multiplier effect* juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. Misalnya, dengan pendapatan yang meningkat dari sektor *blue economy*, masyarakat dapat lebih aktif dalam berinvestasi dalam usaha mikro dan kecil, memperkuat kerja sama antar petani, nelayan, atau pelaku usaha kecil, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, *multiplier effect* menjadi faktor penting dalam memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kepulauan Tanakeke.

4. Inovasi dan Adaptif

Fokus pada inovasi dan adaptasi dalam konteks *blue economy* di masyarakat kepulauan Tanakeke sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa aspek khusus dari focus ini termasuk pengembangan produk, fasilitas dan layanan yang baru mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga riset, dan masyarakat sipil, juga menjadi kunci dalam memfasilitasi inovasi dan adaptasi yang efektif. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga sangat penting, khususnya dalam meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan fokus pada inovasi dan adaptasi dalam *blue economy* di masyarakat kepulauan Tanakeke, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, kuat, dan kompetitif, sambil tetap menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan. Fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Tanakeke secara berkelanjutan, langkah-langkah berikut dapat diambil dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan:

a. Aspek Ekonomi

Pada diversifikasi sumber pendapatan yang merangsang variasi ekonomi dengan memperkenalkan sektor-sektor tambahan selain perikanan, seperti pariwisata yang berkelanjutan, pertanian laut, dan industri kreatif seperti kerajinan lokal. Pengembangan Infrastruktur meningkatkan aksesibilitas ke pulau-pulau di kepulauan dengan memperbaiki infrastruktur transportasi laut serta memperluas jaringan akses ke pasar bagi produk lokal. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di kepulauan tersebut.

b. Aspek Sosial

Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan dasar dipulau- pulau tersebut dengan membangun sekolah, klinik, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pemberdayaan Perempuan mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial melalui pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya, dan dukungan untuk pengembangan usaha mikro. Pengembangan Komunitas dengan membangun kapasitas dan kemandirian komunitas lokal melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat, forum partisipatif, dan pertukaran pengetahuan antar- masyarakat.

c. Aspek Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dengan menerapkan praktik pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk pengaturan zona

penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang berkelanjutan, dan promosi budidaya laut yang ramah lingkungan. Konservasi Ekosistem dengan melindungi dan memulihkan ekosistem seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan habitat laut lainnya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Adaptasi Perubahan Iklim dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, seperti dengan melakukan pemetaan risiko bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, dan mempromosikan praktik pertanian serta perikanan terhadap perubahan iklim dengan menggabungkan strategi-strategi ini secara terpadu, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Tanakeke dapat meningkat secara berkelanjutan sambil memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Ir Hj Joeharnani Tresnati et al., 2022)

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 28 Juli Tahun 2024. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kepulauan Tanakeke. Salah satu Dinas Perikanan dan kelautan adalah lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Dan sangat relevan untuk penelitian ini karena perannya yang penting dalam pengelolaan sumber daya laut. Fokus penelitian dalam hal ini bagaimana Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitian Penelitian kualitatif, yang menurut (Moha, 2019). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Informasi yang

bersifat kualitatif deskriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berfokus pada menggambarkan dan menguraikan fenomena atau situasi yang telah di alami informan. Penelitian deskriptif yang menggambarkan secara detail pemanfaatan potensi konsep ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Tanakeke. Selain itu pendekatan analisis juga di gunakan untuk menganalisis fakta mengenai implementasi konsep ekonomi biru dan efeknya terhadap pembangunan masyarakat pesisir.

C. Informan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposivesampling* yakni penentuan informan tidak berdasarkan pada strata maupun kedudukan tetapi didasarkan pada sumber data, tujuan dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penentuan informan atau responden penelitian sangat penting karena sebagai *keyin formant*. Informan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian terkait dengan Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Di Kepulauan Tanakeke.

Table 3.1 Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	H. Baso Sau	HBS	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan
2.	Bagus	B	Staf Dinas Perikanan Dan Kelautan
3.	Awaluddin	A	Kepala Desa Tompotanah
4.	Muhammad Sahid	MS	<i>Program Officer Blue Forest</i>
5	Rabasia	R	Ketua Kelompok Perempuan Womagroove
6.	Tajuddin	T	Masyarakat Pesisir
7.	Hamsah Daeng Nanga	HDN	Masyarakat Pesisir

D. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi* (pengamatan langsung)

Teknik pengumpulan data melalui *observasi* merupakan tindakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap tertentu.

2. *Interview* (wawancara), dimana peneliti berinteraksi dengan informan

yang akan melibatkan penyusunan pedoman wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian dan terkait dengan obyek penelitian tersebut. Pedoman wawancara ini akan membimbing peneliti dalam mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari para informan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi melibatkan pemanfaatan berbagai jenis dokumen atau rekaman tertulis, seperti laporan, catatan, dokumen perusahaan, buku, jurnal ilmiah, dan materi lainnya yang memiliki relevansi dengan peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Suwerda, 2019). Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu;

1. Reduksi data (*data reduction*),

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi dan fokus terhadap data kasar yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data tersebut.

2. Penyajian data (*data display*).

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat.

F. Teknik Pengabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut;

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh valid.

BAB IV

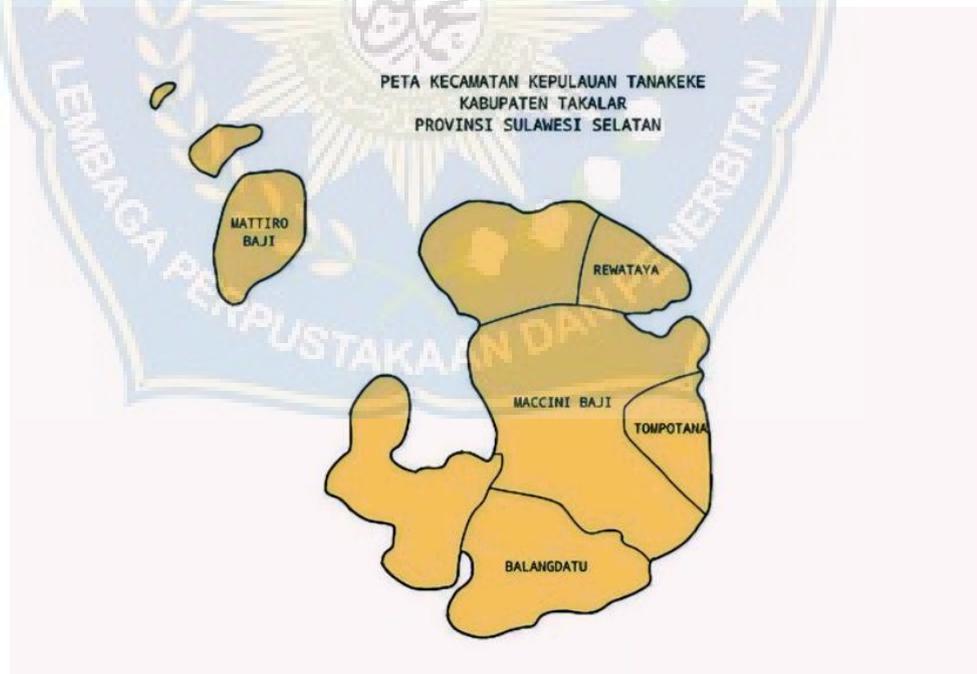
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan inti dari masalah yang menjadi fokus utama penulisan, dimulai dari memberikan deskripsi umum tentang lokasi penelitian, lalu menjabarkan hasil temuan mengenai pemanfaatan potensi *blue economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke. Penulis membahas hasil penulisan dengan merujuk pada batasan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kerangka kerja penulisan. Penjelasan detailnya adalah sebagai berikut:

A. Deskripsi Objek Penulisan

1. Keadaan Geografis Kepulauan Tanakeke

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kepulauan Tanakeke

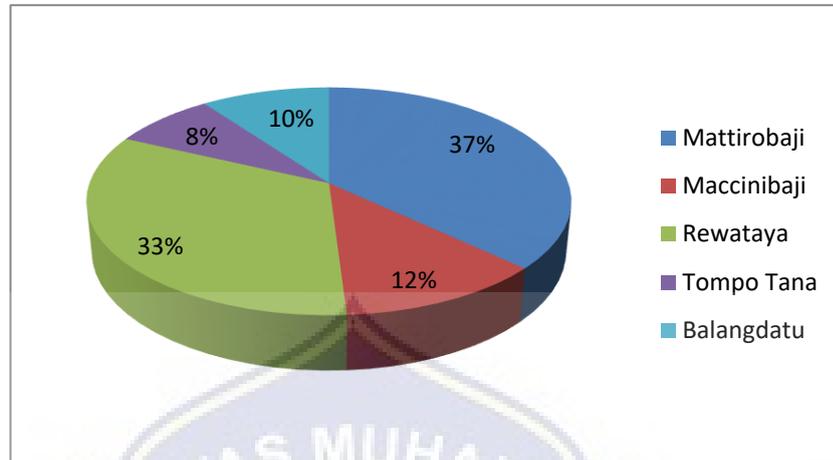


Sumber: Peta Tematik Indonesia

Pulau Tanakeke berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 40 km di sebelah selatan Kota Makassar. Secara geografis, pulau ini terletak di bagian barat daya Sulawesi Selatan dan menghadap langsung ke Selat Makassar. Luasnya adalah 43,12 km², dan berdasarkan UU No 27 Tahun 2007, pulau dengan luasan kurang dari atau sama dengan 2.000 km² diklasifikasikan sebagai pulau kecil. Pulau Tanakeke memiliki lima desa yaitu Maccinibaji, Tompotana, Balangdatu, Rewatayya, dan Mattirobaji. Pulau ini berbatasan dengan Selat Makassar di utara, Selat Tanakeke dan Desa Takalar di timur, Selat Makassar di selatan, serta Selat Makassar di barat.

Secara biofisik, Pulau Tanakeke memiliki topografi datar dengan kelerengan mencapai 0-8%. Berdasarkan observasi lapangan, pulau ini merupakan daratan rendah yang terbentuk dari terumbu karang yang terangkat ke permukaan. Secara umum, garis pantai Pulau Tanakeke berlekuk-lekuk, membentuk teluk, yang menghasilkan banyak endapan lumpur yang menjadi habitat ideal bagi mangrove. Desa terluas di Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah Desa Mattirobaji dengan luas 11,15 km², sementara Desa dengan luas terkecil adalah Desa Tompo Tana dengan luas 2,27 km². Pulau Tanakeke juga memiliki beberapa daerah laguna yang mendukung keragaman hayati laut dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat pesisir.

Gambar 4. 2 Persentase luas daerah Desa di Kecamatan Kepulauan Tanakeke



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Takalar Tahun 2023

Tabel 4. 1 Luas Daerah menurut Desa di Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Desa	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Presentase luas Kecamatan
Mattirobaji	11,15	37,00
Maccinibaji	3,57	11,83
Rewataya	10,05	33,33
Tompo Tana	2,27	7,53
Balangdatu	3,11	10,31
Kepulauan Tanakeke	30,15	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Nelayan merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Pulau Tanakeke. Selain dari hasil penangkapan ikan, mayoritas pendapatan ekonomi masyarakat berasal dari kegiatan pertanian rumput laut, pertanian dan peternakan, industri arang, serta perikanan tambak. Peningkatan jumlah penduduk Pulau Tanakeke dari tahun ke tahun menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dan lingkungan. Pertumbuhan populasi yang pesat

ini meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam yang ada, termasuk degradasi lingkungan pesisir dan laut akibat eksploitasi berlebihan. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengangguran juga menjadi semakin kompleks.

Pada tahun 2022, Kecamatan Kepulauan Tanakeke memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.656 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.875 penduduk laki-laki dan 3.781 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun tersebut adalah 103,77 laki-laki per perempuan. Penduduk Kecamatan Kepulauan Tanakeke tersebar di 5 desa, dengan persentase penduduk tertinggi berada di Desa Balangdatu sebesar 27,78%, sedangkan persentase penduduk terendah berada di Desa Rewataya sebesar 15,30%.

Gambar 4. 3 Presentase penduduk menurut Desa di Kec, Kepulauan Tanakeke



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Takalar tahun 2023

Sementara itu, kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanakeke sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendidikan. Kualitas pendidikan memainkan peran krusial dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Semakin baik pendidikan yang diterima, semakin tinggi potensi kecerdasan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan yang baik juga membuka peluang untuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan teknologi terkini. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada semua lapisan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan, membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Oleh karena itu, prioritas pada sektor pendidikan merupakan langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih merata.

Gambar 4. 4 Penduduk kab. Takalar menurut pekerjaan dan jenis kelamin

NO.	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3.810	1,18	4.230	1,31	8.040	2,49
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	0,00	11.032	3,42	11.033	3,42
3	PELAJAR/MAHASISWA	485	0,15	175	0,05	660	0,20
4	PENSIUNAN	1.065	0,33	345	0,11	1.410	0,44
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.541	0,79	427	0,13	2.968	0,92
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	658	0,20	0	-	658	0,20
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	625	0,19	1	0,00	626	0,19
8	PERDAGANGAN	243	0,08	32	0,01	275	0,09
9	PETANI/PEKEBUN	28.859	8,95	1.370	0,43	30.229	9,38
10	PETERNAK	14	0,00	1	0,00	15	0,00
11	NELAYAN/PERIKANAN	13.019	4,04	32	0,01	13.051	4,05
12	INDUSTRI	9	0,00	28	0,01	37	0,01

Sumber: Dukcapil Kab.Takalar, Sulawesi Selatan tahun 2023

Dari gambar diatas dapat diuraikan profesi pekerjaan paling banyak di Kabupaten Takalar yaitu sebagai Petani/pekebun sebanyak 30.229 penduduk, kedua berprofesi sebagai nelayan sebanyak 13.051 penduduk, dan profesi paling rendah yaitu sebagai peternak sebanyak 15 penduduk.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Banyak negara pesisir dan pulau dengan pendapatan rendah hingga menengah ke bawah, memiliki lautan yang merupakan bagian signifikan dari yurisdiksi mereka. Lautan tidak hanya menjadi sumber peluang ekonomi, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor pesisir, kelautan, dan maritim. Ini termasuk produksi pangan, energi, transportasi, serta berbagai produk dan layanan lainnya, yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pentingnya diversifikasi ekonomi di luar sektor pertanian dan pesisir, karena hal ini mendukung pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif secara global. Oleh karena itu, memanfaatkan potensi laut secara efektif dapat menjadi strategi kunci bagi negara-negara ini untuk mencapai kestabilan

ekonomi dan kemajuan sosial yang lebih besar. Sektor ini juga berpotensi menjadi motor utama dalam pengembangan teknologi baru dan solusi inovatif yang dapat membantu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan keamanan pangan. Dengan memanfaatkan potensi laut secara lebih efektif, dapat memperkuat daya saing di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Tabel 4. 2 Komponen Ekonomi Biru

Jenis kegiatan	Layanan laut	Industri	Pemicu pertumbuhan
Panen hidup	Makanan laut	Perikanan	Ketahanan pangan
		Akuakultur	Permintaan protein
	Bioteknologi kelautan	Farmasi, bahan kimia	R&D untuk perawatan kesehatan dan industry
Ekstraksi sumber daya non hayati, generasi baru sumber daya	Mineral	Penambangan dasar laut	Permintaan mineral
	Energi Air Tawar	Minyak dan gas	Permintaan alternatif sumber energi Kebutuhan air bersih
		Deselinasi	
Perdagangan dan perdagangan dalam dan sekitar lautan	Transportasi dan Perdagangan	Pengiriman Infrastruktur dan layanan pelabuhan	Pertumbuhan perdagangan lintas laut dan peraturan internasional
		Pariwisata dan rekreasi	Pertumbuhan pariwisata global
		Pertumbuhan penduduk	Urbanisasi pesisir Peraturan domestic

Sumber: AMCOECC Blue Economy Tahun 2022

Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan tantangan dalam hubungan manusia dengan alam. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, terutama di wilayah pesisir seperti di kabupaten Takalar, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh adalah Kepulauan Tanakeke, yang terkenal dengan keindahan pulaunya. Wilayah pesisir ini memberikan kesempatan bagi penduduk lokal untuk mengembangkan ekonomi mereka, baik melalui pariwisata maupun penjualan makanan khas Kepulauan Tanakeke terkhusus hasil panen laut para nelayan kepada pengunjung.

Secara bertahap, konsep blue economy secara tidak langsung diimplementasikan, meskipun ada banyak fakta yang mengungkap kendala-kendala dalam proses penerapannya. Ini termasuk pembahasan tentang prinsip-prinsip dan indikator yang terlibat dalam konsep *blue economy*:

1. Inklusi Sosial

Inklusi sosial dalam konteks blue economy dimasyarakat kepulauan Tanakeke adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama mereka yang rentan atau terpinggirkan, turut serta dalam manfaat dan pengelolaan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Prinsip kepedulian sosial menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi, terjadi interaksi antara masyarakat yang berbeda. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah. Ini termasuk program kemitraan atau kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir dalam mengelola

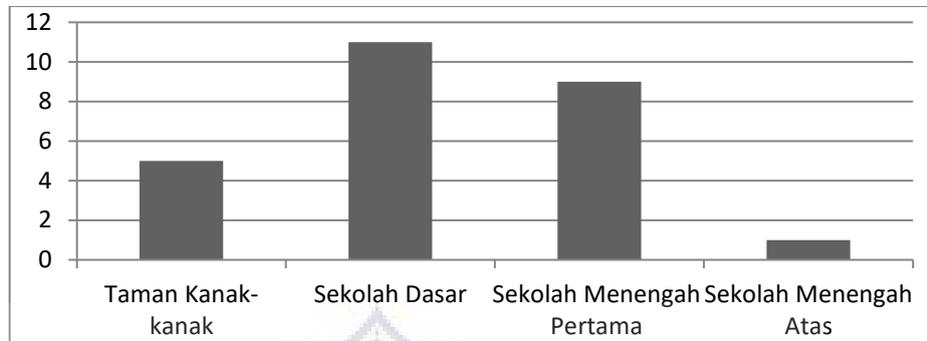
sumber daya alam dan menjaga keberlangsungan hidup bersama. Dalam mewujudkan kesetaraan sosial, di perlukan kemudahan bagi seluruh elemen masyarakat dalam mengakses layanan yang ada di daerah tersebut. Sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang merasa termarginalisasikan dan kesetaraan bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat di kepulauan tanakeke. Berikut beberapa aspek layanan sosial yang ada di Kepulauan Tanakeke.

a. Aspek pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kepulauan tanakeke. Adanya kemajuan di wilayah tersebut tidak lepas dari peranan pendidikan yang merata. Hal ini menunjukkan urgensi dari pendidikan untuk bisa di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, guna untuk meningkatkan kualitas individu masyarakat kepulauan tanakeke. Kondisi geografis di kepulauan tanakeke yang wilayahnya terpisah-pisah. Oleh karena itu, peningkatan sarana pendidikan harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke. Dengan peningkatan kualitas individu masyarakat di Kepulauan Tanakeke penerapan konsep *blue economy* bisa terealisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Tanakeke.

Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah sarana pendidikan untuk pendidikan usia TK sebanyak 5 sekolah, tingkat SD dan sebanyak 11 sekolah, tingkat SMP sebanyak 9 sekolah, serta tingkat SLTA sebanyak 1 sekolah.

Gambar 4. 5 Penduduk kab. Takalar menurut pekerjaan dan jenis kelamin



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kepulauan Tanakeke hanya terdiri satu unit SLTA dan Madrasah Aliyah (MA). Sekolah ini menjadi pusat untuk peserta didik melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas.

b. Akses kesehatan

Sarana kesehatan di Kepulauan Tanakeke memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan mendukung penanganan penyakit, pencegahan wabah, dan perawatan kesehatan ibu dan anak, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, keberadaan layanan kesehatan yang baik juga mendukung produktivitas masyarakat dalam sektor ekonomi, termasuk dalam pemanfaatan potensi blue economy.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan sinergi yang baik, kita dapat memastikan bahwa pembangunan sarana kesehatan sejalan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan

kondisi kesehatan yang terjaga, masyarakat dapat lebih optimal dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seperti budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, dan pelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu, peningkatan sarana kesehatan harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke.

Gambar 4. 6 Sarana Kesehatan Kepulauan Tanakeke

No	Sarana Kesehatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Rumah sakit	–	–	–
2.	Rumah Sakit Bersalin	–	–	–
3.	Poliklinik	–	–	–
4.	Puskesmas	1	1	1
5.	Puskesmas Pembantu	5	5	5
6.	Apotek	–	–	–

Sumber: <https://takalarkab.bps.go.id> tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di Kepulauan Tanakeke hanya terdiri dari satu unit puskesmas. Puskesmas ini berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan utama bagi penduduk setempat, memberikan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan umum, pengobatan, dan konsultasi medis. Selain puskesmas utama, terdapat juga lima puskesmas pembantu yang tersebar di berbagai wilayah di Kepulauan Tanakeke. Puskesmas pembantu ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke daerah-daerah yang lebih terpencil, sehingga masyarakat di seluruh kepulauan tetap

dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah. Namun, meskipun ada lima puskesmas pembantu yang berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan, jumlah tersebut masih dianggap kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan populasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan penambahan sarana kesehatan yang lebih memadai untuk masyarakat Kepulauan Tanakeke.

Melihat kondisi inklusi sosial di Kepulauan Tanakeke, setelah penulis turun ke lapangan dan melakukan diskusi dengan beberapa elemen masyarakat kemudia penulis menemukan bahwa ada lima layanan yang masih susah diakses oleh warga, yaitu:

- 1) Akses air bersih yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat.
- 2) Ketersediaan pelayanan administrasi di tingkat kabupaten yang sulit dijangkau oleh masyarakat pulau karna kondisi geografis.
- 3) Akses pasar yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selalu ada perantara sehingga pendapatan masyarakat tidak maksimal.
- 4) Bantuan alat tangkap nelayan yang tidak merata.
- 5) Pengelolaan sampah oleh Dinas lingkungan hidup belum sampai di Kepulauan Tanakeke.

Kekurangan akses terhadap layanan-layanan ini menunjukkan bahwa inklusi sosial di Kepulauan Tanakeke masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan berpartisipasi penuh dan menikmati manfaat dalam pembangunan berkelanjutan bergerak menuju

masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama.

Hal ini sejalan dengan Gunter Pauli dalam konsep *blue economy* indikator inklusi sosial. Dalam penerapan konsep *blue economy*, diperlukan pendekatan indikator inklusi sosial. Gagasan ini mencakup usaha untuk membentuk masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap orang merasa diakui, dihargai, dan memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, etnis, atau kondisi lainnya.

Dalam menganalisis hasil wawancara terkait Inklusi sosial, penulis kemudian menyusun beberapa pertanyaan mengenai aspek inklusi sosial, dan tanggapan informan dalam melihat aspek inklusi sosial di kepulauan Tanakeke sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Pertanyaan Aspek Inklusi Sosial

No.	Indikator	Jabatan	Tanggapan
1.	Inklusi Sosial	Kepala Desa Tompot anah	Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum muda. Program-program pemberdayaan ekonomi khusus telah dikembangkan untuk mereka. Misalnya, pelatihan kewirausahaan untuk mendukung perempuan dalam memulai usaha kecil di sektor kelautan. Kelompok pemuda juga didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif seperti budidaya terumbu karang dan pariwisata berbasis lingkungan. Tahun lalu kita sempat fasilitasi pengelolaan rumput laut menjadi kerupuk yang bekerjasama dengan blueforest dalam pendampingan. Pemdes menguatkan dari atau mendukung dari sarana dan prasarana seperti apa yang dibutuhkan kelompok perempuan untuk memproduksi rumput laut menjadi kerupuk.
		Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan	Partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan cukup tinggi. Sebagian besar penduduk terlibat dalam perikanan, budidaya rumput laut, dan pariwisata bahari. Mereka memiliki peran penting dalam setiap aspek ekonomi, dari penangkapan hingga pemasaran hasil laut. Selain itu, ada program-program pelatihan yang digarap oleh pemerintah dan LSM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.
		Program Officer Blue Forest	Kita selalu mendorong bagaimana keterlibatan perempuan dan masyarakat rentan, jadi diawal kita bertemu, membicarakan semua bahwa kita akan melakukan rehabilitasi, tapi kita butuh pandangan mereka, karena orang-orang di desa adalah orang yang paling dekat dengan mangrove misalnya, otomatis ada pengetahuan lokal yang kita mau angkat

	disitu, bagaimana cara atau teknik yang dilakukan masyarakat. Di <i>Blueforest</i> kita ada agenda desa rehabilitasi, jadi di agenda ini kita kawinkan pengetahuan dari masyarakat, pengetahuan <i>scientific</i> dari <i>Blueforest</i> , jadi kita melakukan pengambilan database dilapangan, semua lokasi-lokasi rehab, kita sampaikan ke masyarakat dan masyarakat bagaimana pendapatnya.
Masyarakat pesisir	Ada beberapa pelatihan yang kami dapatkan mengenai pengelolaan sumberdaya laut seperti pengelolaan rumput laut menjadi keripik, pengelolaan ikan bandeng tanpa tulang yang di inisiasi oleh pemerintah desa. Hanya saja pemasaran dari produk kami tidak begitu efektif sehingga saat ini masyarakat yang pernah mengelolah produk itu tidak lagi dilanjutkan sampai sekarang karna minimnya pendapatan yahh karna pemasarannya hanya di pulau tanakeke saja. Edukasi yang kami dapatkan dari pemerintah dan lembaga blue forest yaitu terkait bagaimana menjaga ekosistem laut sehingga sumberdaya yang di laut bisa terus di mamfaatkan secara berkelanjutan.

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari pertanyaan wawancara diatas mengenai aspek inklusi sosial yang mempertanyakan mengenai peran dan dukungan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat dan peran aktif lembaga *Blueforest*. Dimana dalam kemampuan menyelenggarakan *blue economy* apakah ada kegiatan dan peran aktif pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Tanakeke agar tidak ada yang dimarjinalkan dan semua elemen mengambil andil dan mendapatkan perannya masing-masing.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Desa Tompo tana bapak Awaluddin terkait peran dan dukungan pemerintah desa dalam pemanfaatan blue economy di kepulauan Tanakeke, sebagai berikut:

“Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum muda. Program-program pemberdayaan ekonomi khusus telah dikembangkan untuk mereka. Misalnya, pelatihan kewirausahaan untuk mendukung perempuan dalam memulai usaha kecil di sektor kelautan. Kelompok pemuda juga didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif seperti budidaya terumbu karang dan pariwisata berbasis lingkungan. Tahun lalu kita sempat fasilitasi pengelolaan rumput laut menjadi kerupuk yang bekerjasama dengan blueforest dalam pendampingan. Pemdes menguatkan dari atau mendukung dari sarana dan prasarana seperti apa yang dibutuhkan kelompok perempuan untuk memproduksi rumput laut menjadi kerupuk.” (Wawancara dengan A, 03/06/2024)

Pemerintah desa berperan aktif dalam memperkuat kelompok perempuan dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk proses produksi. Mereka mengatur akses ke tempat pengumpulan rumput laut dan menyediakan ruang pengolahan seperti ruang pengeringan dan penyimpanan. Selain itu, Pemdes juga menyediakan peralatan produksi seperti mesin penggiling dan peralatan kemasan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerupuk rumput laut yang dihasilkan.

Bimbingan teknis yang diberikan oleh *Blue Forests*, kelompok perempuan mendapatkan pelatihan tentang teknik pengelolaan yang berkelanjutan dan praktik pengolahan yang ramah lingkungan. Mereka juga dibimbing dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Kolaborasi ini tidak hanya memberdayakan kelompok perempuan secara ekonomi melalui produksi kerupuk rumput laut, tetapi juga

memperkuat hubungan antara masyarakat lokal, Pemdes, dan organisasi non-profit seperti *blue forests* dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Muhammad Sahid selaku *Program Officer Blueforest* terkait peran aktif *Blue Forest* sebagai lembaga sosial masyarakat yang melibatkan semua elemen masyarakat tanpa ada yang dimarjinalkan, sebagai berikut:

“Kita selalu mendorong bagaimana keterlibatan perempuan dan masyarakat rentan, jadi diawal kita bertemu, membicarakan semua bahwa kita akan melakukan rehabilitasi, tapi kita butuh pandangan mereka, karena orang-orang di desa adalah orang yang paling dekat dengan mangrove misalnya, otomatis ada pengetahuan lokal yang kita mau angkat disitu, bagaimana cara atau teknik yang dilakukan masyarakat. Di *Blueforest* kita ada agenda desa rehabilitasi, jadi di agenda ini kita kawinkan pengetahuan dari masyarakat, pengetahuan *scientific* dari *Blueforest*, jadi kita melakukan pengambilan database dilapangan, semua lokasi-lokasi rehab, kita sampaikan ke masyarakat dan masyarakat bagaimana pendapatnya.” (Wawancara dengan MS, 30/07/2024)

Dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan dan masyarakat rentan, *Blueforest* selalu menekankan pentingnya pandangan dan partisipasi mereka dalam setiap tahap rehabilitasi. Pertemuan awal dengan masyarakat di desa bertujuan untuk mendiskusikan rencana rehabilitasi dan mendengarkan pandangan mereka. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang sangat dekat dengan ekosistem, seperti mangrove, sehingga sangat penting untuk mengangkat pengetahuan lokal tersebut, termasuk cara dan teknik yang mereka gunakan. Di *Blueforest*, terdapat agenda desa rehabilitasi yang menggabungkan pengetahuan lokal masyarakat dengan pengetahuan ilmiah dari *Blueforest*. Proses ini melibatkan pengambilan

database di lapangan dan menyampaikan informasi mengenai lokasi-lokasi rehabilitasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pendapat masyarakat lokal dan memastikan bahwa program rehabilitasi dilakukan dengan efektif.

Selanjutnya terkait partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan cukup tinggi, dengan sebagian besar penduduk terlibat dalam perikanan, budidaya rumput laut, dan pariwisata bahari. Hal ini sejalan dengan wawancara bersama Bapak Baso Sau kepala Dinas Perikanan dan Kelautan:

“Partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan cukup tinggi. Sebagian besar penduduk terlibat dalam perikanan, budidaya rumput laut, dan pariwisata bahari. Mereka memiliki peran penting dalam setiap aspek ekonomi, dari penangkapan hingga pemasaran hasil laut. Selain itu, ada program-program pelatihan yang digarap oleh pemerintah dan LSM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.” (Wawancara dengan BS, 04/06/2024).

Di Kepulauan Tanahkeke, potensi alam seperti mangrove dan terumbu karang menjadi aset berharga yang harus dilindungi dan dikelola dengan bijaksana oleh masyarakat. Pemanfaatan yang berlebihan dapat merusak ekosistem ini, sehingga penting bagi masyarakat untuk membatasi aktivitas mereka demi keberlanjutan sumber pendapatan. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan ekonomi berbasis kelautan menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan keberhasilan sektor ini. Upaya untuk melibatkan kelompok-kelompok terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum muda, melalui inisiasi pemerintah setempat telah menunjukkan hasil yang positif.

Blue Economy melibatkan masyarakat pesisir kepulauan Tanakeke terkait pelatihan yang mereka dapatkan, berdasarkan wawancara bersama Rabasia selaku ketua kelompok perempuan womagrove, sebagai berikut:

“Ada beberapa pelatihan yang kami dapatkan mengenai pengelolaan sumberdaya laut seperti pengelolaan rumput laut menjadi keripik, pengelolaan ikan bandeng tanpa tulang yang di inisiasi oleh pemerintah desa. Hanya saja pemasaran dari produk kami tidak begitu efektif sehingga saat ini masyarakat yang pernah mengelolah produk itu tidak lagi dilanjutkan sampai sekarang karna minimnya pendapatan yahh karna pemasarannya hanya di pulau tanakeke saja. Edukasi yang kami dapatkan dari pemerintah dan lembaga blue forest yaitu terkait bagaimana menjaga ekosistem laut sehingga sumberdaya yang di laut bisa terus di mamfaatkan secara berkelanjutan.” (Wawancara dengan R, tanggal 30/07/2024).

Masyarakat Kepulauan Tanakeke telah menerima berbagai pelatihan pengelolaan sumber daya laut, seperti pembuatan keripik rumput laut dan pengolahan ikan bandeng tanpa tulang, yang diinisiasi oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, pemasaran produk-produk tersebut kurang efektif, terbatas hanya di pulau Tanakeke, sehingga pendapatan yang dihasilkan sangat minim. Akibatnya, banyak masyarakat yang sempat mengelola produk tersebut tidak melanjutkan usaha ini. Edukasi dari pemerintah dan lembaga Blue Forest juga diberikan terkait bagaimana menjaga ekosistem laut agar sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pemerintah lokal, dengan peran strategisnya, telah berupaya keras untuk mendorong inklusi sosial melalui kebijakan dan program yang mendukung partisipasi semua lapisan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal.

2. Waste (Peminimalisiran Limbah)

Minimize waste adalah upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan atau dikirimkan ke tempat pembuangan sampah, dengan mengadopsi praktik-praktik seperti pengurangan konsumsi, penggunaan kembali bahan atau produk, dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Tujuan dari minimasi limbah adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta mendorong praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Ini mencakup penekanan pada pencegahan limbah di sumbernya dan pembangunan masyarakat yang lebih sadar akan lingkungan.

Prinsip ini menekankan pada pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di Pulau Tanakeke, dengan perhatian khusus pada upaya masyarakat dan pemerintah untuk mencegah pencemaran laut. Meminimalisir dan mengurangi limbah yang diperoleh dari kegiatan perekonomian di Kepulauan Tanakeke adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yang fokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang material, menjadi kunci dalam upaya ini.

Dalam menganalisis hasil wawancara terkait *Minimize Waste*, penulis kemudian membuat pertanyaan yang sesuai dengan aspek *Minimize Waste*. Pertanyaan ini dirancang untuk menggali lebih dalam mengenai praktik pengurangan sampah yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang telah berhasil.

Tabel 4. 4Pertanyaan Aspek *Minimize Waste*

No.	Pertanyaan	Jabatan	Tanggapan
1.	<i>Minimize Waste</i>	Kepala Desa Tompotana	Saat ini tidak ada pengelolaan sampah, sampah masyarakat berserakan dimana-mana dan pembuangan akhir sampah di Laut. Belum ada program edukasi bagi para pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan limbah. Selain itu, tidak ada juga dorongan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan menerapkan sistem pengolahan limbah yang efisien.
		Masyarakat pesisir	Sampai saat ini kami belum merasakan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah itu tidak ada sekali, mulai dari edukasi, menyediakan tempat sampah ataupun member arahan untuk tidak membuang sampah ke laut atau di pekarangan. Di desa kami tidak ada disediakan fasilitas tempat sampah jadi yah kita memang tidak punya pembuangan akhir selain langsung membuang ke laut.
		Program Officer Blue Forest	Kalau di Blueforest kita sebut itu dengan sekolah lapang. Untuk saat ini baru kita kembangkan di desa Tompotana itu kebun pekarangan dengan memanfaatkan limbah, jadi ada sisa sayur-sayuran dan buah-buahan, dicampur dengan limbah-limbah yang sudah difermentasi. Tentunya ada pelatihan yang diberikan untuk membuat mikroorganisme lokal, bagaimana pembuatan pupuk kompos dan bagaimana pembuatan pupuk cair tapi syaratnya adalah memanfaatkan apa yang ada di rumah, seperti limbah kulit buah-buahan. Intinya sampah limbah rumah tangga yang dihasilkan dimasing-masing rumah tangga itu dihasilkan.
		Ketua Kelompok Womagrave	Program ini membawa banyak manfaat. Pertama, kami berhasil mengurangi jumlah sampah rumah tangga sedikit demi sedikit, meskipun tidak semua bisa diolah menjadi pupuk. Kedua, tanaman

		di kebun kami menjadi lebih produktif, sehingga kami dapat memanen lebih banyak sayuran untuk keluarga. Kami juga merasa bangga bisa menerapkan cara-cara ramah lingkungan. Selain itu, program ini juga meningkatkan kerjasama antar tetangga karena kami sering bertukar tips dan pengalaman.
	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan	Kan didaerah takalar ada botol plastik yang digunakan warga untuk mengapungkan tali rumput laut, nah sekarang itu sudah tersedia mesin penghancur jadi sampah tersebut tidak masuk ke laut yang nantinya membahayakan lingkungan, botol plastik itu dibuat menjadi adonan bubur dan sepertinya akan dijual atau dibuat sebagai bahan untuk memadatkan bahan bangunan.

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari pertanyaan wawancara diatas mengenai aspek Minimize Waste yang mempertanyakan mengenai peran dan dukungan pemerintah desa, dinas perikanan dan kelautan, keterlibatan masyarakat dan peran aktif lembaga Blueforest. Berikut praktik pengurangan sampah yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi, dan strategi yang telah berhasil.

a. Pengurangan sampah yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi

Kondisi lingkungan merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat setempat dan juga pemerintah. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk dapat mengancam perekonomian di Kepulauan Tanakeke karna pusat penghasilan dan pendapatan masyarakat adalah memanfaatkan sumber daya laut atau ekosistem laut.

Dalam peraturan bupati Takalar nomor 65 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada Pasal 4 ayat (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) penguatan komitmen pemerintah daerah dan DPRD di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 2) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 3) pembentukan sistem informasi;
- 4) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- 5) penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- 6) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masyarakat dan pelaku usaha didorong untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah yang baik, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan inovasi dalam produk serta proses produksi yang lebih efisien. Selain itu, edukasi dan peningkatan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan limbah serta dampaknya terhadap lingkungan juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung inisiatif pengelolaan limbah yang efektif di Kepulauan Tanakeke.

Penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir yang dikelola dengan baik dan fasilitas daur ulang, sangat diperlukan. Selain itu, pemberlakuan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik pengurangan limbah, serta insentif bagi usaha yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, dapat membantu mempercepat perubahan ke arah ekonomi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kepulauan Tanakeke dapat menjadi contoh sukses dalam mengatasi masalah limbah dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Meminimalisir dan mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di Kepulauan Tanakeke perlu langkah-langkah yang harus diambil antara pemerintah dan masyarakat.

Namun ternyata fakta di lapangan berbeda. Banyak program yang direncanakan tidak terealisasi dengan baik karena kurangnya koordinasi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat di kepulauan Tanakeke:

“Sampai saat ini kami belum merasakan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah itu tidak ada sekali, mulai dari edukasi, menyediakan tempat sampah ataupun member arahan untuk tidak membuang sampah ke laut atau di pekarangan. Di desa kami tidak ada disediakan fasilitas tempat sampah jadi yah kita memang tidak punya pembuangan akhir selain langsung membuang ke laut.” (Wawancara dengan T, 06/06/2024).

Selain itu, terbatasnya sumber daya dan anggaran yang tersedia juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah yang efektif. Seperti halnya yang diungkapkan oleh kepala Desa Tompo Tana dan masyarakat kepulauan Tanakeke:

“Saat ini tidak ada pengelolaan sampah, sampah masyarakat berserakan dimana-mana dan pembuangan akhir sampah di Laut. Belum ada program edukasi bagi para pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan limbah. Selain itu, tidak ada juga dorongan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan menerapkan sistem pengolahan limbah yang efisien.” (Wawancara dengan A, 03/06/2024).

Berdasarkan wawancara dengan A dan T, tergambar bahwa situasi pengelolaan sampah di Kepulauan Tanakeke menghadapi tantangan yang serius. Kedua narasumber sepakat bahwa saat ini tidak ada pengelolaan sampah yang memadai, sehingga sampah masyarakat tersebar di mana-mana dan akhirnya dibuang ke laut. A menyebutkan bahwa belum ada program edukasi untuk pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan limbah, juga tidak ada dorongan untuk menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau menerapkan sistem pengolahan limbah yang efisien. T lebih menyoroti ketiadaan peran pemerintah dalam mengelola sampah di desanya. Tidak ada fasilitas tempat sampah yang disediakan, dan tidak ada arahan untuk pembuangan sampah ke laut atau ke pekarangan.

**Tabel 4. 5 Rincian jumlah volume sampah Kepulauan Tanakeke
Kabupaten Takalar Tahun 2023**

Kecamatan	Volume Produksi Sampah/Hari (Ton)	Volume Produksi Sampah/Tahun (Ton)
Kepulauan Tanakeke	5,46 ton/hari	1.992,2 ton/tahun

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Takalar Tahun 2023

Kepulauan Tanakeke di Kabupaten Takalar menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dengan volume produksi sampah harian yang mencapai 5,46 ton per hari. Jumlah ini mencerminkan tingginya tingkat konsumsi dan produksi limbah oleh masyarakat setempat. Pengelolaan sampah yang efektif menjadi krusial untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari laut dan merusak ekosistem yang menjadi sumber mata pencaharian utama, seperti perikanan dan budidaya rumput laut.

Dalam setahun, Kepulauan Tanakeke menghasilkan total volume sampah sebesar 1.992,2 ton. Angka ini menunjukkan urgensi implementasi program pengurangan dan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menangani sampah mereka sendiri. Peningkatan

kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye lingkungan, program sekolah, dan pelatihan komunitas. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan Kepulauan Tanakeke dapat mengurangi dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Upaya ini juga akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendorong pelestarian sumber daya alam. Melalui partisipasi aktif semua pihak, Kepulauan Tanakeke dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk edukasi, fasilitas, dan arahan merupakan faktor utama yang memperparah masalah pengelolaan sampah di desa tersebut. Dari kesimpulan ini, dapat disarankan agar pemerintah setempat segera mengambil langkah-langkah konkret seperti menyediakan fasilitas tempat sampah, memulai program edukasi yang menyeluruh, dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang cara mengelola sampah dengan baik. Ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah yang tidak terkontrol terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

b. strategi yang telah berhasil.

Sementara itu dalam pengelolaan limbah yang telah diterapkan oleh organisasi pendamping Blueforest telah membuat program sekolah lapang dimana aktivitas warga menanam sayuran dari kulit buah-buahan dan air beras yang diolah menjadi pupuk kompos,

Hal ini senada dengan wawancara Muhammad Sahid selaku *Program Officer Blueforest* terkait peran aktif *Blueforest*, sebagai berikut:

“Kalau di Blueforest kita sebut itu dengan sekolah lapang. Untuk saat ini baru kita kembangkan di desa Tompotana itu kebun pekarangan dengan memanfaatkan limbah, jadi ada sisa sayur-sayuran dan buah-buahan, dicampur dengan limbah-limbah yang sudah difermentasi. Tentunya ada pelatihan yang diberikan untuk membuat mikroorganisme lokal, bagaimana pembuatan pupuk kompos dan bagaimana pembuatan pupuk cair tapi syaratnya adalah memanfaatkan apa yang ada di rumah, seperti limbah kulit buah-buahan. Intinya sampah limbah rumah tangga yang dihasilkan dimasing-masing rumah tangga itu dihasilkan dan dibuat pupuk.” (Wawancara dengan MS, 30/07/2024)

Blue Forest telah menerapkan konsep 'sekolah lapang' dengan pengembangan program kebun pekarangan di desa Tompotana. Pelatihan diberikan untuk mengajarkan pembuatan mikroorganisme lokal dan pupuk dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Tujuannya adalah untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk yang bermanfaat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan limbah dari hasil rumah tangga secara optimal dan mengurangi dampak lingkungan dari sampah rumah tangga.

Gambar 4. 7 Pengolahan limbah sayuran dan buah menjadi pupuk kompos



Sumber: rakyatsulsel.fajar.co.id (2024)

Terkait dengan program yang dijalankan tersebut tentunya beberapa masyarakat antusias, hal ini disampaikan oleh Ibu Rabasia selaku ketua kelompok perempuan womagrove, sebagai berikut:

“Program ini membawa banyak manfaat. Pertama, kami berhasil mengurangi jumlah sampah rumah tangga sedikit demi sedikit, meskipun tidak semua bisa diolah menjadi pupuk. Kedua, tanaman di kebun kami menjadi lebih produktif, sehingga kami dapat memanen lebih banyak sayuran untuk keluarga. Kami juga merasa bangga bisa menerapkan cara-cara ramah lingkungan. Selain itu, program ini juga meningkatkan kerjasama antar tetangga karena kami sering bertukar tips dan pengalaman.” (Wawancara dengan R, 30/07/2024)

Program “sekolah lapang” yang telah di inisiasi oleh *blue forest* dapat membantu mengurangi volumeh limbah rumah tangga di Kepulauan Tanakeke. Limbah rumah tangga yang di kelola menjadi pupuk untuk menanam sayuran di wilayah pesisir merupakan hal yang inovatif untuk meminimalisir limbah di wilayah kepulauan. Tetapi program ini belum bisa mengatasi permasalahan lingkungan di Kepulauan Tanakeke yang sangat kompleks.

Hanya saja pengelolaan sampah plastik di Kepulauan Tanakeke masih merupakan tantangan besar, mengingat sulitnya intervensi dalam masalah ini. Meskipun kesadaran akan dampak lingkungan dari sampah plastik semakin meningkat, infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai belum terbangun secara optimal. Banyak sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, seringkali berakhir di laut atau kawasan pesisir, yang mengancam ekosistem laut dan kesehatan masyarakat.

Kurangnya fasilitas daur ulang, minimnya edukasi mengenai pengelolaan sampah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah plastik memperburuk situasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan strategis untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta implementasi kebijakan yang mendukung pengurangan dan daur ulang sampah plastik. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan tempat pembuangan akhir dan fasilitas daur ulang sehingga masyarakat tidak lagi membuang ke laut.

Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye lingkungan, program sekolah, dan pelatihan komunitas. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan Kepulauan Tanakeke dapat mengurangi dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, program-program edukasi lingkungan yang

terintegrasi dengan Kebijakan yang tegas mengenai penggunaan plastik sekali pakai juga perlu diterapkan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah ini, Kepulauan Tanakeke dapat mengelola sampah dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Gambar 4. 8 Sampah masyarakat yang di buang ke Laut



Gambar 4. 9 Sampah Masyarakat yang dibuang ke pekarangan



Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa tidak berkesinambungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan karena belum merasakan dampak negatifnya dan pemerintah yang sama sekali tidak berinisiatif untuk menyediakan fasilitas seperti tempat pembuangan akhir

dan edukasi kepada masyarakat di kepulauan Tanakeke. Hal ini menyebabkan akumulasi sampah yang semakin parah dan mencemari lingkungan setempat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendekatan terpadu yang melibatkan edukasi masyarakat, penyediaan fasilitas, dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Hal ini sejalan dengan konsep blue economy yang dikemukakan oleh Gunter Pauli dalam hal pengurangan limbah. Dalam penerapan konsep blue economy, penting untuk menggunakan pendekatan yang menekankan pengurangan limbah, yaitu upaya mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan atau dibuang ke tempat pembuangan sampah dengan cara-cara seperti mengurangi konsumsi, menggunakan kembali bahan atau produk, dan mendaur ulang bahan yang dapat didaur ulang. Tujuan dari pengurangan limbah adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup pencegahan limbah di sumbernya, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan pembangunan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.

Namun, dalam wawancara yang di lakukan bersama kepala dinas perikanan dan kelautan mengatakan bahwa saat ini sudah ada mesin penghancur sampah khusus plastik:

“Kan didaerah takalar ada botol plastik yang digunakan warga untuk mengapungkan tali rumput laut, nah sekarang itu sudah tersedia mesin penghancur jadi sampah tersebut tidak masuk ke laut yang nantinya membahayakan lingkungan, botol plastik itu dibuat menjadi adonan bubur dan sepertinya akan dijual atau dibuat sebagai bahan untuk memadatkan bahan bangunan.” (Wawancara dengan BS, 04/06/2024)

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan limbah plastik di daerah Takalar, masyarakat telah mengembangkan inovasi berupa mesin penghancur yang dapat mengubah botol plastik bekas menjadi adonan bubur. Praktik ini bertujuan untuk mencegah limbah plastik masuk ke laut, yang dapat membahayakan ekosistem laut dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Botol plastik yang sebelumnya digunakan untuk mengapungkan tali kini dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Penerapan mesin penghancur ini diharapkan dapat menjadi solusi yang menyeluruh, tidak hanya di Kota Takalar tetapi juga dapat menjangkau kepulauan Tanakeke dan wilayah lainnya. Dengan mengubah botol plastik menjadi adonan bubur, potensi ekonomi dari limbah plastik dapat ditingkatkan. Bahan hasil daur ulang ini dapat dijual atau digunakan sebagai bahan tambahan untuk memadatkan bahan bangunan lokal, membuka peluang baru bagi ekonomi lokal serta mendukung upaya untuk memperkuat infrastruktur di daerah tersebut. Selain manfaat ekonomis, pendekatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi jumlah limbah plastik yang berakhir di lingkungan alaminya.

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti mesin penghancur ini

menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan terus mendorong inovasi dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan, harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih aman untuk generasi mendatang dapat menjadi kenyataan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga akan memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi tersebut dan memastikan bahwa setiap langkah menuju pengelolaan sampah yang efektif memberikan dampak positif.

3. Multiplier Effect (Efek Berganda)

Fokus pada *multiplier effect* dalam konteks *blue economy* di masyarakat kepulauan Tanakeke melibatkan pemahaman tentang bagaimana investasi dan aktivitas ekonomi dalam sektor *blue economy* dapat menghasilkan dampak positif yang berlipat ganda dalam perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, aktivitas ekonomi di sektor perikanan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih luas. Hal ini dapat tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat lokal yang memicu permintaan akan barang dan jasa lainnya, serta berkontribusi positif pada sektor ritel, jasa, dan konstruksi di kepulauan Tanakeke.

Penulis menggali lebih dalam informasi dari beberapa pihak, seperti pemerintah dan LSM, untuk mengetahui potensi apa saja yang bisa dikelola dengan konsep *blue economy* dan masing-masing perannya dalam memanfaatkan potensi *blue economy* di Kepulauan Tanakeke, Kabupaten

Takalar. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan LSM bisa mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan berkelanjutan, sehingga konsep blue economy bisa diimplementasikan di Kepulauan Tanakeke. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tercipta kebijakan dan program yang tepat sasaran, yang tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan laut. Partisipasi aktif dari masyarakat lokal juga akan menjadi kunci sukses dalam penerapan konsep ini, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan ekosistem yang ada.

Dalam menganalisis hasil wawancara terkait efek ganda, penulis kemudian menyusun pertanyaan yang sesuai dengan aspek 'Multiplier Effect' untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengeksplorasi berbagai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari inisiatif yang ada, serta bagaimana efek-efek ini dapat memperkuat atau mempengaruhi upaya keberlanjutan di kawasan tersebut.

Tabel 4. 6 Pertanyaan Aspek *Multiplier Effect*

No.	Pertanyaan	Jabatan	Tanggapan
1.	<i>Multiplier Effect</i>	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan	<p>Tankeke kan merupakan pulau dengan keindahan lautnya dan dapat memancing keramaian dengan suatu inovasi wisata dan jual beli itu akan menggerakkan yang lain, misalnya orang wisatawan yang akan ke Pulau Tanakeke, pastinya membutuhkan sewa perahu dan sewa tenda pasti akan menggerakkan ekonominya dan akan memberikan efek domino.</p> <p>Tentunya Kami akan mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, seperti pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengelolaan ekosistem. Selain itu, kami juga akan memfasilitasi akses ke pasar bagi produk perikanan dan pariwisata, serta mengupayakan investasi untuk infrastruktur penunjang.</p>
		Kepala Desa Tompotana	<p>Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat blue economy melalui program sosialisasi dan edukasi. Selain itu, membangun infrastruktur dasar seperti dermaga dan fasilitas wisata akan sangat penting. Kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang berhubungan dengan ekonomi laut.</p>
		Program Officer Blue Forest	<p>Kita selalu melakukan riset kemudian diskusi baik itu bersama pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat itu jalan terus diskusinya makanya sesuai dengan visi blueforest biar sampai internasional lokal dan global, dari desa kita up sampai ke internasional. Kita hadirkan peneliti dari blueforest dan dari Amerika yang meneliti di tompotana</p>

			<p>penelitian tentang biodiversitas laut. Kita gugah rasa ingin tahu orang luar tentang Tanakeke, jadi dalam artian dari hasil diskusi pemerintah setempat itu kemudian tidak sampai disitu saja, makanya kita hadirkan ke level provinsi untuk melihat peluang di Kepulauan Tanakeke yang akhirnya menciptakan kolaborasi.</p>
		<p>Masyarakat Pesisir</p>	<p>Kami berharap peningkatan kegiatan ekonomi seperti budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, dan pengelolaan hutan mangrove menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait. Misalnya, keberhasilan budidaya rumput laut tidak hanya meningkatkan pendapatan petani rumput laut tetapi juga membuka peluang usaha bagi penyedia peralatan budidaya, transportasi, dan pengolahan produk. Selain itu, peningkatan pendapatan dari sektor perikanan dan kelautan dapat mendorong konsumsi lokal dan investasi dalam pendidikan serta kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir secara keseluruhan.</p>

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari pertanyaan wawancara diatas mengenai aspek *Multiplier Effect* yang mempertanyakan mengenai peran dan dukungan pemerintah desa, dinas perikanan dan kelautan, keterlibatan masyarakat dan peran aktif lembaga *Blue Forest*. Dimana dalam kemampuan menyelenggarakan *blue economy* apakah ada kegiatan dan peran aktif pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Tanakeke dalam memanfaatkan peluang ekonomi.

a. Pengelolaan Pariwisata

Peluang ekonomi di kepulauan Tanakeke tentu sangat berpeluang besar, karena tanakeke merupakan sebuah pulau yang bisa membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menyewakan perahu penyebrangan, penyewaan tenda, homestay, warung makan, dan oleh-oleh khas dari hasil laut para nelayan.

Hal ini sejalan dengan tanggapan wawancara bersama kepala Dinas Perikanan dan kelautan, sebagai berikut:

“Tankeke kan merupakan pulau dengan keindahan lautnya dan dapat memancing keramaian dengan suatu inovasi wisata dan jual beli itu akan menggerakkan yang lain, misalnya orang wisatawan yang akan ke Pulau Tanakeke, pastinya membutuhkan sewa perahu dan sewa tenda pasti akan menggerakkan ekonominya dan akan memberikan efek domino.” (Wawancara dengan BS, 06/06/2024).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Tanakeke memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata laut yang memukau. Keindahan alamnya dapat menarik banyak wisatawan, yang pada gilirannya menciptakan berbagai peluang ekonomi. Inovasi dalam sektor wisata dan perdagangan di pulau ini akan memicu aktivitas ekonomi lainnya. Kebutuhan wisatawan akan layanan seperti penyewaan perahu dan tenda akan menggerakkan perekonomian lokal. Hal ini sejalan dengan Gunter Pauli dalam konsep *blue economy* indikator *multiplier effect*. Dalam penerapan konsep *blue economy*, diperlukan pendekatan indikator *multiplier effect*. Dengan pemanfaatan peluang besar yang berkaitan dengan beberapa sektor lainnya sehingga efek domino bisa berdampak positif untuk kegiatan ekonomi di Kepulauan

Tanakeke dan memaksimalkan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Gambar 4. 10 Gambar Keindahan Alam Kepulauan Tanakeke



Sumber: dokemtasi penulis

Gambar 4. 11 Keindahan Alam Kepulauan Tanakeke



Sumber: dokemtasi penulis

Kepulauan Tanakeke mungkin belum terkenal seperti pulau-pulau yang ada di Selat Makassar, seperti Pulau Samalona dan Khayangan. Pulau ini pun tak memiliki fasilitas hotel atau rumah makan layaknya di pulau wisata. Akan tetapi, bukan berarti pulau ini tak layak dikunjungi.

Keindahannya tak dipungkiri akan memesona siapa pun yang melihatnya. Keindahan Tanakeke bukan hanya pada hamparan pasir putih yang luas, pantai yang landai, atau burung camar yang kadang terbang rendah. Bukan pula sekadar terumbu karang yang indah, keindahan hutan mangrove yang mengelilingi pulau juga menjadi daya tarik tersendiri oleh pulau ini. Lebih dari itu, pulau ini memiliki keistimewaan lainnya.

Pemerintah sangat berperan penting dalam mengelola dan memajukan pariwisata di Kepulauan Tanakeke sehingga pelaku usaha oleh masyarakat lokal seperti, penyewaan tumpangan dari kota ke pulau, penginapan, rumah makan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Kepulauan Tanakeke.

Tidak hanya itu, wawancara terkait bagaimana langkah yang perlu diterapkan untuk mulai menerapkan konsep blue economy di Kepulauan Tanakeke, khususnya untuk menciptakan efek multipiler yang positif.

“Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat blue economy melalui program sosialisasi dan edukasi. Selain itu, membangun infrastruktur dasar seperti dermaga dan fasilitas wisata akan sangat penting. Kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang berhubungan dengan ekonomi laut.” (Wawancara dengan A, 03/06/2024).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah pertama yang perlu diambil untuk menerapkan blue economy di Kepulauan Tanakeke adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya melalui program sosialisasi dan edukasi. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam upaya ini. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti dermaga dan fasilitas wisata sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan laut. Kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan. Diperlukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang berhubungan dengan ekonomi laut, yang pada akhirnya akan menciptakan efek multipiler yang positif bagi perekonomian lokal.

b. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan

Dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengembangan kapasitas ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini tidak hanya akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi pada pelestarian ekosistem laut yang vital untuk keberlangsungan hidup jangka panjang.

Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendukung penerapan blue economy di Kepulauan Tanakeke agar menciptakan efek multipiler yang signifikan:

“Tentunya Kami akan mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, seperti pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengelolaan ekosistem. Selain itu, kami juga akan memfasilitasi akses ke pasar bagi produk perikanan dan pariwisata, serta mengupayakan investasi untuk infrastruktur penunjang.” (Wawancara dengan BS, 04/06/2024).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ini termasuk pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengelolaan ekosistem yang baik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan di Kepulauan Tanakeke dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan. Selain itu, dinas juga akan memfasilitasi akses ke pasar bagi produk perikanan dan pariwisata, memastikan bahwa produk-produk lokal dapat dijual dengan harga yang menguntungkan. Upaya ini dilengkapi dengan mengupayakan investasi untuk pembangunan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan, seperti fasilitas penyimpanan ikan dan dermaga.

Gambar 4. 12 Produksi Budidaya Rumput Laut di kab. Takalar

No	Kecamatan	PRODUKSI BUDIDAYA (Ton)														Total
		Budidaya Tambak					Budidaya Laut					Budidaya air tawar				
		U.Windu	U.Vaname	Gracilaria sp	Bandeng	Lawi-lawi	Rl. Gigaz	Euchi SP	E. cottoni	Lobster	Kerapu	Sumu	Nila	lele	mas	
1	Mappakasunggu	87,78	42,06	10.539,63	772,78	-	8.807,29	23.927,95	87.069,35	-	-	-	-	-	-	-
2	Mangarabombang	42,03	515,01	13.226,35	188,47	274,93	-	87.916,37	230.161,43	6,40	-	-	-	-	-	
3	Sanrobone	12,86	339,47	40.687,78	419,49	-	24.854,56	11.813,49	1.337,99	-	-	-	6,36	-	-	
4	Pattalassang	1,68	-	3.253,32	17,09	-	-	-	-	-	-	-	6,00	12,57	-	
5	Polongbangkeng Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,88	3,85	-	
6	Polongbangkeng Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	-	-	
7	Galesong Selatan	-	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,58	0,26	
8	Galesong	-	1,86	-	27,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Galesong utara	-	3,93	3.682,20	14,28	-	-	-	59,43	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Tanakeke	20,63	102,44	-	7,64	-	-	35.792,93	34.405,24	0,30	-	-	-	-	-	
	Total	165,0	1.010,2	71.389,3	1.447,2	274,9	33.661,9	159.450,7	353.033,4	6,7	-	-	23,4	25,0	0,3	620.487,95

Sumber: ArsipDinas perikanan Kabupaten Takalar (2023)

**Tabel 4. 7 Jumlah Pelaku usaha perikanan dan Kelautan
Kab.Takalar**

No.	Jenis Usaha Perikanan	Jumlah (Orang)
1.	Nelayan	9.772
2.	Pembudidaya Ikan	9.136
3.	Petambak Garam	522
4.	Pengolah Ikan	139
5.	Pemasar Ikan	83
Total		19.652

Sumber: www.satudatakpri.go.id (2023)

Semua kegiatan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dalam wawancara lanjutan dengan Ketua Womagrove, ia menjelaskan bagaimana efek ganda dari pengembangan blue economy berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketua Womagrove mencatat bahwa peningkatan kegiatan ekonomi seperti budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, dan pengelolaan hutan mangrove telah membuka banyak lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan dalam sektor-sektor ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para petani dan nelayan, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru di sektor-sektor terkait, seperti penyediaan peralatan budidaya, transportasi, dan pengolahan produk.

Ketua Womagrove juga menyoroti bahwa peningkatan pendapatan dari sektor-sektor blue economy memiliki efek jangka panjang yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pendapatan tambahan, masyarakat dapat meningkatkan konsumsi lokal, berinvestasi dalam

pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan. Hal ini menciptakan siklus positif yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi di Kepulauan Tanakeke. Melalui pendekatan terpadu yang melibatkan edukasi, penyediaan fasilitas, dan pengawasan ketat, diharapkan efek ganda ini dapat terus memperkuat ekonomi lokal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang, sebagai berikut:

“Efek ini terjadi ketika peningkatan kegiatan ekonomi seperti budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, dan pengelolaan hutan mangrove menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait. Misalnya, keberhasilan budidaya rumput laut tidak hanya meningkatkan pendapatan petani rumput laut tetapi juga membuka peluang usaha bagi penyedia peralatan budidaya, transportasi, dan pengolahan produk. Selain itu, peningkatan pendapatan dari sektor perikanan dan kelautan dapat mendorong konsumsi lokal dan investasi dalam pendidikan serta kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir secara keseluruhan.” (Wawancara dengan R, 30/07/2024)

Perlu dilakukan kajian mendalam tentang potensi dan tantangan yang ada di lapangan. Kajian ini penting untuk memahami kondisi aktual dan kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi untuk menerapkan blue economy di Kepulauan Tanakeke. Dengan pemahaman yang komprehensif, langkah-langkah strategis dapat dirancang secara efektif. Selanjutnya, perlu menginisiasi proyek percontohan yang melibatkan masyarakat lokal. Proyek-proyek ini bisa berupa budidaya laut yang berkelanjutan atau ekowisata, yang dirancang untuk menunjukkan manfaat langsung dari ekonomi biru kepada masyarakat.

Dalam upaya menjembatani potensi lokal dengan dunia internasional, Blueforest telah menjalankan berbagai inisiatif strategis yang melibatkan diskusi mendalam dengan pemerintah dari berbagai tingkat. Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana kolaborasi ini telah berdampak pada pengembangan Kepulauan Tanakeke.

Berikut adalah wawancara dengan pihak dari Blueforest yang menjelaskan pendekatan mereka serta hasil dari keterlibatan mereka, termasuk kehadiran peneliti internasional dan penciptaan peluang kolaboratif:

“Kita selalu melakukan riset kemudian diskusi baik itu bersama pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat itu jalan terus diskusinya makanya sesuai dengan visi blueforest biar sampai internasional lokal dan global, dari desa kita up sampai ke internasional. Kita hadirkan peneliti dari blueforest dan dari Amerika yang meneliti di tompotana penelitian tentang biodiversitas laut. Kita gugah rasa ingin tahu orang luar tentang Tanakeke, jadi dalam artian dari hasil diskusi pemerintah setempat itu kemudian tidak sampai disitu saja, makanya kita hadirkan ke level provinsi untuk melihat peluang di Kepulauan Tanakeke yang akhirnya menciptakan kolaborasi.” (Wawancara dengan MS, tanggal 30/07/2024).

Keterlibatan banyak pihak dalam proyek percontohan ini juga akan meningkatkan penerimaan dan partisipasi mereka dalam inisiatif *blue economy*. Selain itu, penting untuk membangun jaringan dengan lembaga donor dan mitra internasional. Dukungan dari lembaga ini, baik dalam bentuk teknis maupun finansial, akan sangat membantu dalam pelaksanaan proyek percontohan dan pengembangan lebih lanjut. Kolaborasi dengan mitra internasional juga dapat membawa pengetahuan baru yang dapat diterapkan di Kepulauan Tanakeke untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Inovasi dan Adaptif

Kepulauan Tanakeke, sebuah perairan yang kaya akan sumber daya laut, menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan potensinya secara optimal. Di tengah kekayaan alamnya yang melimpah, keberadaan inovasi dan adaptasi menjadi krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi, dalam konteks ini, bukan hanya sebatas menciptakan produk atau teknologi baru, tetapi juga mencakup proses pengelolaan yang lebih efisien, pengolahan hasil laut yang lebih berkualitas, dan pemasaran yang lebih luas.

Adapun, pentingnya adaptasi menyoroti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik itu perubahan pasar global maupun perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sumber daya laut. Dalam penerapan *blue economy* di Kepulauan Tanakeke, inovasi berperan sebagai pendorong utama untuk menciptakan nilai tambah dari hasil laut yang ada. Dengan mengembangkan produk-produk inovatif seperti olahan makanan laut berbahan baku lokal, produk kosmetik dari bahan alami laut, atau teknologi terbaru dalam budidaya rumput laut, Tanakeke dapat mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan daya saing di pasar global. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi juga akan memastikan bahwa praktik ekonomi yang dijalankan tetap berkelanjutan dan tidak merusak

ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat Kepulauan Tanakeke.

Dalam menganalisis hasil wawancara terkait inovasi dan adaptasi, penulis kemudian menyusun pertanyaan yang sesuai dengan aspek 'Inovasi dan Adaptif' untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan merumuskan pertanyaan yang tepat, penulis dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana inovasi diterapkan dan bagaimana individu atau organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan.

Tabel 4. 8 Pertanyaan Aspek Inovasi dan Adaptif

No.	Pertanyaan	Jabatan	Tanggapan
1.	Inovasi Dan Adaptasi	Kepala Dinas Perikanan Dan kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar berencana menyusun beberapa strategi inovasi dan adaptasi. Pertama, kami fokus pada pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk budidaya ikan bandeng dan rumput laut yang dapat beradaptasi dengan kondisi lokal. Kami juga bekerja sama dengan lembaga riset untuk meningkatkan metode budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Kedua, kami mengedukasi masyarakat pesisir tentang pentingnya praktik perikanan yang berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan. Ini meliputi pemanfaatan teknologi baru yang dapat mengurangi dampak lingkungan serta memaksimalkan hasil tangkapan. Selain itu, kami aktif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah dan kerjasama dengan sektor swasta, untuk program blue economy.
		Kepala Desa Tompotanah	Potensi yang ada di tanahkeke termasuk mangrove dan terumbu karang, perlu dibatasi masyarakat supaya mangrove bisa dikelola dengan baik, sehingga

			<p>sumber pendapatan bisa terus berlanjut. Kami lakukan sekarang bagaimana caranya bisa menginisiasi pembuatan peraturan pemerintah desa tentang pengelolaan mangrove, kedua tentang kebijakan pemerintah desa yang dilakukan yaitu pemerintah desa telah membentuk kelompok pengawasan desa tentang pengelolaan mangrove dan terumbu karang.</p> <p>Sebenarnya banyak sekali potensi rumput laut, harapan kita pengelolaan rumput laut jadi produk itu dikelola di desa sehingga potensi harganya juga bisa melonjak tinggi. Kan rumput laut bisa dijadikan bahan kosmetik harus disiapkan memang bahan dan kualitas untuk dijadikan produk itu seperti apa, kalau itu sudah terealisasi itu juga luar biasa, tapi kita harus memerhatikan kualitas produksinya masyarakat</p>
		Program Officer Blue Forest	<p>Kami sangat mendukung akan adanya perubahan, khususnya peningkatan blue economy seperti munculnya inovasi yang terbaru dan dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat, tapi itu tadi kita susah akan adaptasi alam yang susah ditebak.</p>
		Masyarakat Pesisir	<p>Saat ini kami belum merasakan inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah atau lembaga pendamping dalam pengelolaan sumberdaya laut, saat ini kami masih menggunakan alat-alat tradisional untuk mengelola hasil laut yang diperoleh.</p> <p>Rumput laut kendalanya tidak sama, karena di lapangan itu cuman satu bulan ditanam rumput laut sudah ada masalah yang terjadi bukan cuman itu bisajadi disebabkan oleh pengaruh alam, terasa beda dengan 10 tahun lalu, sekarang sudah susah sekali, tangkap ikan nelayan sekarang itu untung kalau dalam satu hari mereka dapat 50 ribu. Krena potensi daya alam yang berkurang</p>

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari pertanyaan wawancara di atas mengenai aspek inovasi dan adaptif yang mempertanyakan mengenai peran dan dukungan pemerintah desa, dinas perikanan dan kelautan, keterlibatan masyarakat, dan peran aktif lembaga Blueforest. Dalam kemampuan menyelenggarakan blue economy, apakah ada peranan pemerintah dan *Blue Forest* di Kepulauan Tanakeke dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Pertanyaan ini juga mengarah pada bagaimana koordinasi antar pihak tersebut dapat meningkatkan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam wawancara ini, kami ingin menggali lebih dalam mengenai inovasi dan adaptasi yang telah diterapkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan bagaimana hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk memulai, kami ingin menanyakan tentang strategi inovasi dan adaptasi yang dilakukan oleh dinas dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sebagai berikut:

“Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar berencana menyusun beberapa strategi inovasi dan adaptasi. Pertama, kami fokus pada pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk budidaya ikan bandeng dan rumput laut yang dapat beradaptasi dengan kondisi lokal. Kami juga bekerja sama dengan lembaga riset untuk meningkatkan metode budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Kedua, kami mengedukasi masyarakat pesisir tentang pentingnya praktik perikanan yang berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan. Ini meliputi pemanfaatan teknologi baru yang dapat mengurangi dampak lingkungan serta memaksimalkan hasil tangkapan. Selain itu, kami aktif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah dan kerjasama dengan sektor swasta, untuk mendukung program-program blue economy. Ketiga, kami memfasilitasi pengembangan produk olahan lokal yang dapat menambah nilai ekonomis dari hasil laut, seperti produk berbasis rumput laut dan olahan bandeng.” (Wawancara dengan BS, 04/06/2024).

Terkait rancangan inovasi untuk mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan di kepulauan Tanakeke yaitu ikan bandeng dan udang yang banyak produksinya, hal ini sejalan dengan wawancara dengan Kepala Desa Tompotana:

“Hasil produksi di Tanakeke adalah ikan bandeng yang banyak produksinya pasarannya ketika dikelola sangat produktif ketika produksi ikan bandeng dan udang dikelola dengan baik, misalnya ikan bandeng tanpa tulang, abon ikan. Jika semua elemen masyarakat terlibat saya rasa penerapan ekonomi biru ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.” (Wawancara dengan A, 03/06/2026).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tanakeke memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi biru melalui pemanfaatan sumber daya laut utamanya, seperti produksi ikan bandeng dan udang. Produk-produk inovatif seperti ikan bandeng tanpa tulang, abon ikan dan bahan utama kosmetik dari rumput laut, telah terbukti dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar.

Pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dinas terkait, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan konsep ekonomi biru secara efektif dan berkelanjutan di Tanakeke. Dalam aspek inovasi dan adaptasi, sinergi antara berbagai pihak ini akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Kolaborasi ini akan memungkinkan pengembangan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi.

Gambar 4. 13 Budidaya Air Payau Kabupaten Takalar



Sumber: Arsip Dinas perikanan Kabupaten Takalar (2023)

Tidak hanya Ikan bandeng dan udang saja yang bisa dimanfaatkan, tetapi produksi rumput laut yang merupakan produk terbesar kedua di Sulawesi Selatan yang bisa digunakan sebagai pangan alternative dan jika dikembangkan dengan baik akan meningkatkan nilai ekonomi.

Hal ini sejalan dengan wawancara bersama kepala Desa Tompotana:

“Sebenarnya banyak sekali potensi rumput laut, harapan kita pengelolaan rumput laut jadi produk itu dikelola di desa sehingga potensi harganya juga bisa melonjak tinggi. Kan rumput laut bisa dijadikan bahan kosmetik harus disiapkan memang bahan dan kualitas untuk dijadikan produk itu seperti apa, kalau itu sudah terealisasi itu juga luar biasa, tapi kita harus memerhatikan kualitas produksinya masyarakat” (Wawancara dengan A, 03/06/2026).

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa Tanakeke memiliki potensi besar dalam pengelolaan rumput laut sebagai sumber daya ekonomi biru yang bernilai tinggi. Pemanfaatan rumput laut untuk produk-produk seperti bahan kosmetik menunjukkan prospek yang menggiurkan dalam meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi lokal. Pentingnya mempersiapkan infrastruktur dan kualitas bahan baku menjadi fokus utama

untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan rumput laut dapat dirasakan secara merata di seluruh desa Tanakeke.

Gambar 4. 14 Budidaya Air Laut Kabupaten Takalar



Sumber: Arsip Dinas perikanan Kabupaten Takalar (2023)

Tidak hanya rumput laut tetapi Mangrove juga bisa dikembangkan, langkah pertama yang diambil adalah menginisiasi pembuatan peraturan pemerintah desa yang khusus mengatur pengelolaan mangrove. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa mangrove dapat dikelola dengan baik, sehingga manfaat ekonominya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Selain itu, pemerintah desa juga telah mengambil kebijakan strategis dengan membentuk kelompok pengawasan desa.

Kelompok ini bertanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan mangrove dan terumbu karang, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak ekosistem laut dan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan. Dengan adanya peraturan dan

kelompok pengawasan ini, diharapkan ekosistem mangrove dan terumbu karang di Kepulauan Tanakeke dapat terus terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Kelompok ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut.

Diperkuat dengan pernyataan Bapak Awaluddin selaku kepala desa di salah satu desa di kepulauan Tanakeke, sebagai berikut:

“Potensi yang ada di tanahkeke termasuk mangrove dan terumbu karang, perlu dibatasi masyarakat supaya mangrove bisa dikelola dengan baik, sehingga sumber pendapatan bisa terus berlanjut. Kami lakukan sekarang bagaimana caranya bisa menginisiasi pembuatan peraturan pemerintah desa tentang pengelolaan mangrove, kedua tentang kebijakan pemerintah desa yang dilakukan yaitu pemerintah desa telah membentuk kelompok pengawasan desa tentang pengelolaan mangrove dan terumbu karang.” (Wawancara dengan A, 03/06/2024).

Tetapi hal ini bertentangan dengan pandangan beberapa masyarakat di Kepulauan Tanakeke, seperti pandangan dari Daeng Nanga. Yaitu;

“Kalau kami di larang untuk menebang pohon magrove yang kami tanam sendiri, itu tdk adil. Karna kami yang menanam magrove itu, dan kadang juga ada masyarakat yang membeli kawasan pohon magrove untuk di kelola menjadi arang. Kalau sekarang kami di larang, yahh modal kami tidak kembali atau rugi. (Wawancara dengan HDN, tanggal 30/07/2024).

Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan ekosistem laut dan belum dapat mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, kurangnya edukasi terkait lingkungan dan ekosistem laut serta pendidikan lingkungan juga turut memperburuk kondisi tersebut. Kebijakan yang di rencanakan oleh pemerintah desa tompotana yaitu pengawasan hutan magrove dan terumbu karang belum bisa di terima

oleh beberapa masyarakat di kepulauan tanakeke. Masyarakat yang menganggap bahwa kawasan hutan mangrove itu bagian dari warisan budaya nenek moyang mereka yang menanamnya dahulu. Tetapi kondisi yang terjadi sekarang di kepulauan tanakeke tidak lagi sama seperti dahulu, masyarakat dahulu melakukan “tebang tanam” untuk menjaga keberlanjutan kawasan hutan mangrove. Sehingga kawasan tersebut tidak hanya dieksploitasi tetapi di kelola secara berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah dan LSM sangat di perlukan perannya dalam memberi atau menciptakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pelestarian lingkungan di kepulauan tanakeke masih tetap terjaga.

Ada banyak sekali potensi laut yang ada di kepulauan Tanakeke yang bisa dimanfaatkan dan memunculkan beragam inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah, LSM dan pihak lain dalam mengelola hasil dari sumber daya laut yang diperoleh dan bisa dirasakan oleh masyarakat, wawancara bersama bapak Hamsah Daeng Nanga, terkait hal ini sebagai berikut:

"Saat ini kami belum merasakan inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah atau lembaga pendamping dalam pengelolaan sumberdaya laut, saat ini kami masih menggunakan alat-alat tradisional untuk mengelola hasil laut yang diperoleh." (Wawancara dengan HDN, tanggal 30/07/2024).

Hal ini senada dengan wawancara bapak Tajuddin sebagai berikut:

“Pemanfaatan sumber daya laut di pulau ini tidak di kelola dengan baik, bisa saja masyarakat melakukan industri kecil-kecilan untuk budidaya lobster, ikan sunu dan pengolahan rumput laut jadi bahan kosmetik, makan, dan lain-lain. selama ini kami terkendala mewujudkan itu karna infrastruktur yang masih terbatas. Contohnya listrik yang kadang padam kalau cuaca memburuk.” (Wawancara dengan T, 03/06/2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dari pemerintah belum terealisasi dengan baik. Masyarakat menyadari bahwa sumber daya yang mereka peroleh tidak bisa di kembangkan dengan baik dan meningkatkan keuntungan yang besar karena keterbatasan fasilitas infrastruktur pengelolaan sumber daya laut. Peranan LSM dalam hal ini *blue forest* untuk bisa membantu masyarakat dalam hal menciptakan inovasi yang tidak menggunakan banyak biaya untuk pengelolaan peningkatan produk dari hasil sumber daya laut di Kepulauan Tanakeke.

Selain Inovasi, tentunya adaptasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut di Tanakeke. Perubahan iklim dan fluktuasi pasar menuntut pendekatan yang adaptif dalam strategi pengelolaan.

Adaptasi, di sisi lain, memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi biru Tanakeke. Kepulauan Tanakeke juga untuk saat ini fokus dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya laut. Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat di Kepulauan Tanakeke, mengancam keberlanjutan ekonomi biru yang menjadi andalan mereka. Perubahan pola cuaca, kenaikan suhu air laut, dan meningkatnya frekuensi serta intensitas badai telah membawa dampak negatif pada ekosistem laut dan kegiatan perikanan lokal. Hal ini juga sejalan dengan wawancara bersama Blueforrest, sebagai berikut:

“Kami sangat mendukung akan adanya perubahan, khususnya peningkatan blue economy seperti munculnya inovasi yang terbaru dan dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat, tapi itu tadi kita susah akan adaptasi alam yang susah ditebak.” (Wawancara dengan MS, 30/07/2024).

Hasil tangkapan ikan dan produksi rumput laut yang menurun adalah bukti nyata dari dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan bapak Tajudin selaku Masyarakat di kepulauan Tanakeke:

“Rumput laut kendalanya tidak sama, karena di lapangan itu cuman satu bulan ditanam rumput laut sudah ada masalah yang terjadi bukan cuman itu bisajadi disebabkan oleh pengaruh alam, terasa beda dengan 10 tahun lalu, sekarang sudah susah sekali, tangkap ikan nelayan sekarang itu untung kalau dalam satu hari mereka dapat 50 ribu. Krena potensi daya alam yang berkurang.” (Wawancara dengan T, tanggal 03/06/2024).

Kesimpulan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Tanakeke mengalami kesulitan yang signifikan dalam memanfaatkan sumber daya laut mereka, terutama rumput laut dan perikanan, akibat perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang semakin tidak menentu. Rumput laut yang dulu bisa ditanam dengan mudah kini menghadapi berbagai masalah dalam waktu singkat, seringkali hanya satu bulan setelah penanaman. Perbedaan kondisi alam dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu sangat terasa, dimana perubahan ini berdampak langsung pada produktivitas dan hasil tangkapan nelayan yang kini semakin menurun.

Nelayan yang sebelumnya dapat menggantungkan hidup dari laut kini hanya memperoleh pendapatan yang minim, kurang dari Rp 50.000 per hari, menunjukkan betapa berkurangnya potensi daya alam di wilayah ini.

Perubahan kondisi lingkungan ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan tantangan baru yang dihadapi. Penurunan hasil tangkapan nelayan menekankan perlunya strategi adaptasi yang lebih efektif dan dukungan teknologi untuk memantau serta mengatasi dampak perubahan iklim.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan adaptasi. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi akses terhadap pelatihan, teknologi, dan modal untuk memperkuat kapasitas inovatif masyarakat. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha lokal perlu didorong untuk berani mengadopsi praktik baru dan berpartisipasi dalam pengembangan solusi-solusi inovatif.

Dengan demikian, indikator inovasi dan adaptif bukan sekadar menjadi alat untuk meningkatkan produksi dan efisiensi di sektor perikanan dan kelautan Tanakeke, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat global. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi biru Gunther Pauli dengan indikator inovasi dan adaptasi. Dalam menerapkan konsep ekonomi biru, diperlukan pendekatan indikator inovasi dan adaptasi. Dengan kata lain mengacu pada kemampuan menciptakan solusi baru (inovasi) dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan (adaptasi). Kedua aspek ini penting bagi kemajuan dan keberhasilan di berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Inovasi adalah menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan solusi baru untuk memecahkan suatu masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada.

C. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Blue economy di Kepulauan Tanakeke

Penerapan *blue economy* di Kepulauan Tanakeke menawarkan berbagai peluang, seperti pengembangan pariwisata berbasis ekologi, dan pemanfaatan sumber daya laut. Dengan memanfaatkan potensi ekosistem laut dan pesisir secara optimal, Tanakeke dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, koordinasi yang efektif antara berbagai pihak seperti pemerintah.

1. Peluang

Kepulauan Tanakeke yang terletak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya hutan mangrove, tambak ikan bandeng dan udang, serta budidaya rumput laut, Tanakeke memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menerapkan konsep ekonomi biru atau *blue economy*. *Blue economy* adalah pendekatan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan ekosistem laut.

Hutan mangrove di Kepulauan Tanakeke tidak hanya berfungsi sebagai penyangga alami yang melindungi pantai dari abrasi dan bencana alam, tetapi juga merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan udang. Dengan melestarikan dan mengelola hutan mangrove secara berkelanjutan, masyarakat dapat mempertahankan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjamin kelangsungan sumber daya perikanan. Selain itu, hutan mangrove juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata ekologi yang menarik, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata.

Tambak ikan bandeng dan udang di Tanakeke sudah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, dengan penerapan teknologi dan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan, produksi tambak dapat ditingkatkan tanpa merusak lingkungan. Penggunaan pakan alami dan sistem resirkulasi air dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sekitar.

Budidaya rumput laut di Tanakeke juga menawarkan peluang besar dalam penerapan blue economy. Rumput laut memiliki banyak manfaat, baik sebagai bahan pangan, bahan baku industri kosmetik, maupun sebagai sumber bioenergi. Pengembangan budidaya rumput laut yang efisien dan ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapatan petani rumput laut dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Selain itu, rumput laut juga berperan dalam menyerap karbon dioksida, sehingga membantu mitigasi perubahan iklim. Penerapan konsep blue

economy di Tanakeke juga membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Program pelatihan dan pendidikan tentang teknik budidaya yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, serta kewirausahaan di sektor maritim dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Gambar 4. 15 Budidaya Rumput Laut



Sumber ; dokumentasi penulis

Peningkatan kapasitas ini tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga mendorong munculnya inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya laut. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat di Tanakeke dapat memperluas pasar untuk produk-produk perikanan dan kelautan mereka. Platform online dan *e-commerce* dapat membantu petani dan nelayan untuk menjual hasil tangkapan dan budidaya mereka ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Peningkatan akses pasar ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dan mengurangi

ketergantungan pada tengkulak atau perantara, di kalangan masyarakat Kepulauan Tanakeke

Pada akhirnya, penerapan *blue economy* di Kepulauan Tanakeke dapat memberikan dampak multiplikasi yang signifikan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan, budidaya, dan pariwisata, efek positif juga akan dirasakan oleh sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan mendorong pembangunan berkelanjutan yang holistik dan inklusif, memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, LSM dan masyarakat lokal sangat di perlukan dan implementasi kebijakan yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Tantangan

Dalam penerapan *blue economy* tentunya ada tantangan di dalam prosesnya, seperti limbah yang menjadi salah satu masalah yang cukup kompleks di Kepulauan Tanakeke. Limbah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi sangat mengganggu dan memberikan dampak negatif pada lingkungan serta ekosistem.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) nomor 112 tahun 2013, air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti permukiman, apartemen, rumah makan, dan asrama memiliki dampak besar terhadap pencemaran lingkungan. Air

limbah domestik ini sering kali mengandung berbagai zat pencemar yang dapat merusak kualitas air dan lingkungan di wilayah pesisir. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, dan berdampak buruk pada masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Masalah sampah plastik di tepi pantai juga merupakan isu serius yang semakin memburuk. Sampah plastik yang menumpuk di pesisir tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membahayakan kehidupan laut dengan menyebabkan keracunan atau penyumbatan pada saluran pencernaan hewan. Situasi ini semakin meresahkan, namun pemerintah desa setempat belum melaksanakan upaya yang memadai untuk menangani masalah ini. Belum ada penyediaan sarana dan prasarana kebersihan yang cukup serta pemasangan papan peringatan yang diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Selain itu, limbah yang berasal dari pupuk kimia juga memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan rumput laut. Pencemaran akibat pupuk kimia dapat mengubah keseimbangan nutrisi dalam ekosistem laut, menyebabkan pertumbuhan rumput laut yang tidak sehat atau bahkan kematiannya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas dan kuantitas rumput laut, tetapi juga berpotensi mengganggu seluruh rantai makanan di ekosistem pesisir. Rumput laut yang sehat sangat penting untuk habitat laut dan juga memiliki nilai ekonomi bagi industri

perikanan lokal, sehingga dampak dari pencemaran ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat, hal ini sejalan dengan wawancara bersama kepala desa Tompotana:

“Pengembangan pertanian di desa balangdatu dengan maccini baji sistem pemupukannya itu pakai pupuk kimia, sehingga resapan kelaut itu sangat tinggi, sehingga memengaruhi pertumbuhan rumput laut, artinya kalau di tanakeke sudah tidak sama dengan daerah lain, pertumbuhannya baru satu atau dua bulan sudah gagalmi bisa dilihat bagaimana kondisinya saat ini.” (Wawancara dengan A, 03/06/2024).

Selain tantangan limbah juga terkait anggaran biaya untuk program-program yang akan dijalankan dalam mendukung penerapan *blue economy* yang berkelanjutan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah menjadi salah satu kendala dalam mendukung praktik-praktik konsep *blue economy* dalam mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan kepulauan Tanakeke. hal itu dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagai berikut:

“Kita bekerja berdasarkan Anggaran pendapatan belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kini PAD sudah rendah, program kerja tinggi. Misalnya pelatihan nelayan yang berkebutuhan khusus yang tidak terealisasi karena kurangnya anggaran. Sebenarnya kita sudah menyusun beberapa program dari beberapa tahun ini terkait pengembangan *blue economy*, hanya saja mungkin karena keterbatasan anggaran Negara. Seandainya bisa dimaksimalkan dengan program kita dan dukungan anggaran sekira bisa cepat terealisasi dan bisa diperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah yang seharusnya kita lakukan, tapikan inovasi jalan, pikiran, cita-cita, visi-misi, harus didukung dengan finansialnya.” (Wawancara dengan BS, 04/06/2024).

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi kendala-kendala dalam penerapan

konsep blue economy. Berkurangnya sumber daya laut akibat limbah dan aktivitas ekonomi menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya di Kepulauan Tanakeke menjadi tumpuan hidup dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Dengan menerapkan konsep blue economy, diharapkan sumber daya dan kondisi wilayah pesisir Kepulauan Tanakeke tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan potensi blue economy di Kepulauan Tanakeke belum berjalan dengan optimal, meskipun kepulauan ini memiliki sumber daya laut yang bisa unggulan seperti rumput laut, ikan bandeng, udang, dan sumber daya laut yang lain. Selain dari sumber daya laut, potensi dari sektor pariwisata bahari menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan di Kepulauan Tanakeke. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan blue economy di wilayah ini antara lain adalah faktor alam yang kurang mendukung serta keterbatasan anggaran biaya yang tersedia untuk pengembangan dan pemeliharaan program-program terkait. Berdasarkan empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Inklusi Sosial, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan ekonomi berbasis kelautan menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan keberhasilan sektor ini. Upaya untuk melibatkan kelompok-kelompok terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum muda, melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan telah menunjukkan hasil yang positif.
2. Minimize Waste (Peminimalisiran Sampah), Pengelolaan sampah, terutama sampah plastik yang mencemari laut, masih belum efektif. Sampah plastik yang mencemari ekosistem laut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk *blue economy*, seperti kualitas

ikan dan kesehatan rumput laut. Sampah plastik yang mencemari laut juga bisa menghambat pertumbuhan hutan mangrove.

3. **Multipiler Effect (Efek Berganda)**, Kepulauan Tanakeke memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata laut yang memukau dan jika dimanfaatkan dengan baik memberikan efek berganda. Inovasi dalam sektor wisata dan perdagangan di pulau ini akan memicu aktivitas ekonomi lainnya. Kebutuhan wisatawan akan layanan seperti penyewaan perahu dan tenda akan menggerakkan perekonomian lokal. Hal ini menciptakan efek domino yang positif, di mana peningkatan aktivitas pariwisata akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan di Kepulauan Tanakeke.
4. **Inovasi dan adaptif**, Tingkat inovasi dalam pemanfaatan sumber daya laut dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta pasar global masih rendah. Hal ini menghambat perkembangan dan daya saing produk blue economy dari Kepulauan Tanakeke di pasar yang lebih luas. Kurangnya inovasi juga membatasi potensi pengembangan produk baru dan teknologi pengolahan.

B. Saran

1. **Peningkatan Anggaran dan Investasi:** Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah serta mendorong investasi dari sektor swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang terkait dengan blue economy. Ini mencakup pembangunan fasilitas pengolahan hasil laut, pusat penelitian, dan pelatihan bagi

masyarakat. Selain itu, insentif investasi perlu diberikan untuk menarik minat investor.

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat: Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat harus diperluas dan ditingkatkan untuk memastikan inklusi sosial yang lebih baik. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat berpartisipasi aktif dalam sektor blue economy dan merasakan manfaatnya. Pendidikan lingkungan dan pelatihan teknis untuk nelayan dan petani rumput laut sangat penting.
3. Pengelolaan Sampah yang Efektif: Implementasi sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Upaya pengurangan penggunaan plastik dan peningkatan daur ulang sampah harus digalakkan, seperti dengan implementasi alat penghancur sampah plastik menjadi bata yang menyeluruh penerapannya dan bukan hanya di Kota Takalar saja. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pembuangan sampah ke laut. Pemerintah daerah dapat membentuk program kolaboratif dengan komunitas lokal untuk membersihkan pantai dan laut.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemanfaatan potensi blue economy di Kepulauan Tanakeke dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134.
- Bidayani, E. (2016). Model Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep *Blue Economy*. *Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Halim, W. S. (2016). Analisis Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada Perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal. *Agora*, 4(1), 179–185.
- Haris, M. R., Syarif, M. I., & Rahmawati, N. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Penambangan Pasir Laut Di Daerah Perairan Galesong Perspektif Siyasah Dusturiyah. 1(1), 38–62.
- Harsono, G. (2020). *Hidrografi Berbasis Ekonomi Biru: Sepilihan Esai-Esai*. Pandiva Buku.
- Hidayaturahmi, H., & Herna, M. (2012). Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. *Gender: Dalam Hubungan Internasional Di Indonesia–Australia*, 74.
- Indarti, I., & Kuntari, Y. (2015). Model Pemberdayaansumber Daya Masyarakat Pesisir Melalui *Re-Engineering* Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan.

- Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. (2022). *Modal Sosial dan Kemiskinan Nelayan*. Universitas Brawijaya Press.
- Ir Hj Joeharnani Tresnati, D. E. A., Yasir, I., & Ir H Ambo Tuwo, D. E. A. (2022). *Rumput Laut untuk Ketahanan Pangan, Mitigasi Lingkungan, Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan*. *Deepublish*.
- Izzati, N., & Affa, M. S. (2023). Peran Pimpinan Universitas Dalam Mempromosikan Keadilan Sosial dan Kesetaraan Bagi Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1(2), 250–260.
- Khaldun, R. I. (2017). Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Indonesia di Pasar Global. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 99–125.
- Kustiwan, I., & Ramadhan, A. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning* (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan), 3(1), 64–84.
- Mawar, M., Rahman, A., & Hermanto, A. (2023). *BUMI MANISE* Wajah Pariwisata Pesisir Pulau Ambon dalam Perspektif *Blue Economy* Berbasis Kearifan Lokal. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Mira, M., Firdaus, M., & Reswati, E. (2014). Penerapan Prinsip *Blue Economy* pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 17–23.
- Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.

- Negara, S. D. (2013). Membangun perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 247–262.
- Pauli, G. A. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm publications.
- Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). *Juridical Review of Blue Economy in Indonesia*. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 123–156.
- Rani, F., & Cahayasari, W. (2015). *Model blue economy di kawasan asia pasifik (studi kasus: penerapan model blue economy pada industri perikanan Indonesia)*. Riau University.
- Respatiningsih, H., Arini, A., Kurniawan, B., Perpajakan, A., Ngudi, U., & Purworejo, K. (2020). Kemampuan adaptasi umkm di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 99–113.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 147.
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinaga, F., Par, S. S. T., Par, M. S., Santi Palupi Arianti, M. M., Jaman, I. K., SS, M. S., & Sudjana, M. (2013). *Destinasi Sustainable Event Studi Kasus: Bali*. Penerbit Andi.
- Sofyaningrum, R., Maulana, A. I., Sistiyaningrum, K., & Alfian, F. (2023). *Blue Economy and Green Economy: Ecocritical Study of Kompas Short Stories Collection Keluarga Kudus*. *Suar Betang*, 18(1), 105–121.

Suaib, M. S. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab.

Sultoni, A. H. (2023). *Kemaritiman Berwawasan Ekonomi Biru (Blue Economy) Perspektif Al-Qur 'An*. Institut PTIQ Jakarta.

Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan bank sampah berkelanjutan di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74–86.



L

A

M

P

I

R

A

N



Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Teip 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4338/05/C.4-VIII/V/1445/2024

22 May 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

14 Dzulqa'dah 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0507/FSP/A.1-VIII/V/1445/2024 tanggal 22 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH SYAMSUL

No. Stambuk : 10564 1101720

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PEMANFAATAN POTENSI BLUE ECONOMY DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN TANAKEKE"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Mei 2024 s/d 28 Juli 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

Dr. Muh. Ariel Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

05-24

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan



Wawancara dengan Staff Dinas Perikanan dan Kelautan



Wawancara dengan Kepala Desa Tompotana



Wawancara dengan Tokoh masyarakat Kepulauan Tanakeke



Wawancara dengan Ketua womangrove



Wawancara dengan Blue Forest



Wawancara dengan Tokoh masyarakat kepulauan Tanakeke



Pengelolaan Rumput Laut



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Akamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Syamsul

Nim : 105641101720

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I MUH. SYAMSUL 105641101720

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

> 10 words



BAB II MUH. SYAMSUL 105641101720

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX
24% INTERNET SOURCES
7% PUBLICATIONS
11% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	5%
3	www.researchgate.net Internet Source	4%
4	www.neliti.com Internet Source	4%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III MUH. SYAMSUL 105641101720

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha
Student Paper

4%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



BAB IV MUH. SYAMSUL 105641101720

ORIGINALITY REPORT

0% LULUS
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



'BAB V MUH. SYAMSUL 105641101720

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Muh. Syamsul, lahir di Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar pada 10 Juni 2002, Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Nyengka Dg Nyau dan Ibu Nurbaya Dg Jipa. Penulis Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD INPRES 140 Tompotanah dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Mappakasunggu dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Takalar dan lulus pada tahun 2019. Setelah satu tahun menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan niat dan semangat yang ada dalam diri sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan kurung waktu 3 tahun 10 bulan. Pada Tahun 2024 tepatnya pada 16 Agustus 2024, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul skripsi “Pemanfaatan Potensi *Blue Economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di kepulauan tanakeke”. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti lain, dan bagi penulis sendiri, Terimakasih